

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERDA KEWENANGAN KAMPUNG
DIKECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos
Dalam Fakultas Ushuluddin**

Oleh:

**BENI PRADANA
NPM. 1431040067**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2018 M**

**IMPLEMENTASI PERDA KEWENANGAN KAMPUNG DI
KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN**

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si
Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos
Dalam Fakultas Ushuluddin

oleh:

**BENI PRADANA
NPM. 1431040067**

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
14340 H/2018 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Beni Pradana

NPM : 1431040067

Program Study : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *“Implementasi Perda Kewenangan Kampung Di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan didalamnya. Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, agustus 2018
Yang menyatakan

Beni Pradana

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA KEWENANGAN KAMPUNG DI KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN

**Oleh
BENI PRADANA**

Perda kewenangan kampung merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berisi tentang pemberian kewenangan pada kampung, meliputi pengelolaan dana, pemeliharaan infrastruktur, peraturan kampung dan pelestarian adat istiadat. Dan wewenang tersebut diberikan secara penuh kepada kampung sebagai salah satu program unggulan di Kabupaten Way Kanan selain itu dilihat dari isi perda ini sangatlah komplek maka dari itu kebijakan sangat berkontribusi apabila implementasi dilakukan secara maksimal dan akan sangat terlihat dampak kegagalannya yang menyebabkan implementasi tidak merata pembangunan tidak merata dan lain-lain.

Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi perda kewenangan kampung dan tujuan penelitian Untuk mengetahui apakah perda kewenangan kampung yang dibuat oleh pemerintah Way Kanan sudah terealisasi secara maksimal ataukah belum maksimal. Serta kegunaan penelitian Penelitian ini untuk memberikan memberikan masyarakat untuk menilai peraturan yang akan diterapkan atau yang sudah diterapkan, dan penelitian (*field research*), proses penelitian ini yaitu dengan mengangkat permasalahan yang ada dilapangan.

Hasil penelitian ini Implementasi perda kewenangan kampung belum berhasil secara keseluruhan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap program pemerintah, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, rendahnya transparansi pemerintah dan kondisi geografis yang sangat menyulitkan serta beberapa faktor penghambat yaitu faktor dari masyarakat, faktor dari pemerintah, faktor dari geografis dan kurangnya transparansi aparatur kampung, tetapi ada progres kedepan pada perda ini yang ditandai dengan adanya faktor pendorong yang dapat menyusutkan perda ini yaitu komunikasi, transparansi, dan tingkat kepedulian serta pengetahuan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi perda kewenangan kampung belum berhasil diterapkan secara keseluruhan namun sebagai peneliti bukan hanya mengkritik tetapi juga menawarkan upaya dan solusi untuk memaksimalkan implementasi perda kewenangan kampung yaitu upaya sosialisasi, pendekatan personal, dan konsolidasi dan peran partisipasi dari masyarakat dan menawarkan solusi dengan cara Meningkatkan intensitas sosialisasi, mencari pematerei terbaik, membentuk tim pengawasan, meningkatkan transparansi dan masyarakat dan aparatur pemerintahan harus berkontribusi dan bekerjasama dengan solid.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat Jl. Letkol H Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI PERDA KEWENANGAN
KAMPUNG DI KECAMATAN REBANG TANGKAS
KABUPATEN WAY KANAN**

Nama

BENI PRADANA

NPM

1431040067

Prodi

Pemikiran Politik Islam

Fakultas

Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si
NIP. 197503172003121003

Pembimbing II

Abdul Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005

Ketua Jurusan

Dr. Nadirsah Hawari, M.A
NIP. 197406282008011013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat Jl. Letkol H Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI PERDA KEWENANGAN KAMPUNG DI KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN** yang disusun oleh **Beni Pradana, NPM: 1431040067**, Jurusan : **Pemikiran Politik Islam** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari Kamis tanggal **13 September 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sudarman, M.Ag

Sekretaris : Angga Natalia, M.I.P

Penguji I : Tin Amalia Fitri, S. Sos, M.Si

Penguji II : Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag
NIP. 195808231993031001

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui."(surat Al Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Junaidi S dan ibunda Nirma Wati tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan menyayangi saya sejak didalam kandungan hingga sekarang, berkat dukung dari materil dan moril serta selalu mendoakan saya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini, semoga ilmu yang didapat bisa diimplementasikan kepada masyarakat dan menjadi hadiah dan kebanggaan untuk kedua orang saya.
2. Adiku tersayang, yang kadang membuat penulis kesal dan marah tetapi kalian tetapi menjadi adiku tersayang, terimakasih atas do'a kalian dan selalu memberikan penulis semangat dan motivasi untuk keberhasilan saya selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak pembimbing 1 dan 2 telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk saya sebagai penulis.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepada temen seperjuangan yaitu teman-teman di jurusan pemikiran politik islam angkatan 2014 kelas A maupun kelas B telah memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Beni Pradana dilahirkan di Kampung Gunung Sari Kecamatan Kasui Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 08 juni 1996 penulis merupakan anak ke-1 dari 3 saudara terlahir dari pasangan buah cinta kasih dan sayang dari pasangan Junaidi S dan Nirma Wati.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Lebak Peniangan dan selesai pada tahun 2008. SMPN 3 Rebang Tangkas dan selesai pada tahun 2011. SMAN 1 Rebang Tangkas 2014. Dan ketiga pendidikan tersebut berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Kemudian penulis mengikuti pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama tepatnya di Jurusan Pemikiran Politik Islam dimulai pada semester 1 TA.2014/2018.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Beni Pradana
NPM. 1431040067

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia, nikmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bermutiarakan salam selalu terlimpahkan kepada tokoh politik dunia, pemimpin umat, rosul kita yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir yaitu rosulullah mahammad SAW, yang telah memberikan kita jalan menuju syurganya Allah yaitu al-Qur'an dan hadits, dalam penelitian ini pula penulis telah banyak dibantu berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M. Ag, selaku dekan fakultas Uhluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A selaku ketua jurusan pemikiran politik Islam dan Ibu Tin Amalia Fitri, S. sos, M.Si selaku sekretaris jurusan pemikiran politik Islam.
3. Bapak pembimbing I sekaligus pembimbing akademik yaitu Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si telah sangat banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta dari sosok beliau juga penulis mendapat pembelajaran bahwa setiap rencana dalam hidup tak selalu sesuai harapan dan butuh kerja keras dan tawakal.

4. Bapak pembimbing II yaitu Abdul Qohar, M, Si yang merupakan orang yang luar biasa dibalik sikap beliau yang humoris, beliau merupakan sosok yang kaya ilmu dan berwawasan luar, penulis sangat berterima kasih karena telah memberikan banyak waktu dan ilmunya kepada penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
5. Kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis.
6. Kepala staf dan karyawan Perpustakaan Ushuluddin Dan Studi Agama, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung telah berkenan meminjamkan literatur yang dibutuhkan.
7. Kepada teman-teman angkatan 2014 baik jurusan Pemikiran Politik Islam, Tafsir Hadits, Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir , Studi Agama-Agama, Psikologi Agama, Sosiologi Agama, Ahlak Tasawufm, Filsafat Agama dan adik-adik tingkat yang selalu memberikan do'a dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Semoga do'a, dukungan, bantuan yang telah diberikan, dijadikan amal shalih dan dicatat oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Amin Ya Robbal'Alamin.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Beni Pradana
NPM. 1431040067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sumber data.....	10
I. Metode Pengumpulan data.....	11
J. Metode analisis data.....	15

K. Tinjauan Pustaka.....	16
BAB II. Teori Implementasi Kebijakan.....	18
A. Implementasi kebijakan.....	18
1. Pengertian implementasi.....	18
2. Teori implementasi kebijakan	20
3. Tahap implementasi kebijakan.....	22
4. Kondisi ekonomi sosial politik.....	25
5. Disposisi atau sikap pelaksana.....	26
BAB III. Kecamatan Rebang Tangkas dan perda kewenangan kampung.....	28
A. Sejarah Kecamatan Rebang Tangkas.....	28
B. Luas wilayah Kecamatan Rebang Tangkas.....	29
C. Wilayah Administrasi	39
D. Perda Kewenangan Kampung	30
BAB IV Implementasi Perda Kewenangan Kampung.....	33
a) Faktor penghambat Implementasi Perda kewenangan kampung.....	34
b) Faktor pendorong Implementasi Perda kewenangan kampung.....	45
c) Usaha dan solusi.....	55
d) hasil Implementasi Perda kewenangan kampung.....	63
BAB VPENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul penelitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, untuk menghindari beberapa kesalahan dalam pengertian dan istilah, maka dari itu penulis mengutarakan beberapa istilah sebagai berikut yang didasari judul : *“Implementasi Perda Kewenangan Kampung di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan”*

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan terkait hukum dan peradilan¹ sedangkan, dalam kebijakan, implementasi adalah penggambaran atau implemenasi kebijakan dalam suatu kerangka yang terkelola serta memiliki tahapan yaitu implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan dan kepemimpinan serta pengendalian². Dan implementasi yang dimaksud disini adalah implementasi perda kewenangan kampung yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan cara meneliti sejauh manakah perda kewenangan kampung sudah diterapkan diwilayah Way Kanan khususnya di Kecamatan Rebang Tangkas.

¹ Abdul wahab solichin, *analisi kebijakan dari formulasi implementasi kebijakan Negara edisi kedua*, (Jakarta: PT bumi aksara, 2008), h. 8

² Raint nugroho dwidjowijoto, *kebijakan public untuk Negara-negara berkembang*, (Jakarta : PT alex media kompitindo, 2009) h. 13

Masyarakat adalah arti manusia seluas-luasnya yang terikat dalam situasi dan kondisi baik dari sisi politik, agama, sosial serta budaya.³ Menurut Saptono masyarakat yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan memiliki kepentingan seperti politik, sosial, agama dan budaya.⁴ Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud merupakan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Rebang Tangkas dan menjadi menetap di Kecamatan Rebang Tangkas

Perda merupakan program pemerintah yang dibuat khusus dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, sebagai upaya pemerintah dalam mensukseskan program yang di buat dan menjadi solusi bagi permasalahan yang terdapat di masyarakat, hadirnya perda diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau penyimpangan yang terjadi yang terjadi dimasyarakat serta dapat menyejahterakan masyarakat⁵.

Berdasarkan pemaparan diatas, judul ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dan untuk mengetahui tingkat terealisasinya kebijakan perda kewenangan kampung tersebut, serta faktor pendorong dan faktor penghambat dalam terealisasinya kebijakan tersebut. Penelitian ini sebagai upaya untuk menyukseskan setiap kebijakan yang diputusan khususnya perda kewenangan kampung, agar setiap kebijakan akan terealisasi secara maksimal dan dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

³ *Ibid.* h. 885.

⁴ Saptono, *sosiologi politik*. (semarang : phibeta aneka gama, 2006) h. 3.

⁵ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Jogjakarta: liberty, 2006), h. 8.

B. Alasan Memilih judul

1. Alasan Akademik

Penelitian impementasi perda kewenangan kampung ini memuat tentang kebijakan publik dan kemasyarakatan sangat relevan jurusan yang penulis tekuni yaitu pemikiran politik islam karena di dalam jurusan ini penulis mempelajari tentang kebijakan publik yang merupakan ilmu mengenai segala hal tentang kebijakan publik mulai dari penyebab adanya kebijakan, proses pembuatan kebijakan, sampai dengan di sahkanya suatu kebijakan dan mempelajari sosiologi politik yang merupakan ilmu tentang kemasyarakatan yang dihubungkan dengan politik.

2. Alasan subjektif

Penulis memutuskan untuk meneliti perda kewenangan kampung ini karena data sangat mudah untuk diperoleh dan lokasi sangat mudah dijangkau karena penulis bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi penelitian serta penulis sudah mengenal sebagian masyarakat dilokasi penelitian tersebut.

3. Alasan sosiologis

Perda ini dibuat untuk mempercepat program yang telah rencanakan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan dan kampung diberikan kepercayaan sebagai perealisasi perda tersebut serta bertanggung jawab untuk pengelolaan dana, pemeliharaan infrastruktur, peraturan desa dan pelestarian adat istiadat tetapi fakta

dilapangan menyatakan masih banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai perda kewenangan kampung terbut.

C. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah atau Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah yakni untuk Pemerintah Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Perda sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Substansi dari perda tersebut haruslah merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum. Dalam masyarakat daerah, peraturan daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat daerah secara umum, agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan desentralisasi.

Perda kewenangan kampung adalah produk hukum dari pemerintahan kabupaten yang bertujuan menjawab permasalahan yang terjadi dimasyarakat,

dengan menyerahkan urusan secara penuh diharapkan peraturan daerah kewenangan kampung-kampung dapat meningkatkan kesejahteraan karena dengan adanya perda tersebut akan lebih mudah menyelesaikan masalah dimasyarakat karena memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Ditambah dengan kondisi masyarakat yang multikultural yang memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat yang berbeda dan masyarakat yang memiliki pandangan, pemahaman serta kondisi yang berbeda dari pemaparan diatas, pada dasarnya manandai adanya kebijakan atau perda kewenangan kampung yang disahkan pada tahun 2016⁶, dari perda tersebut maka banyaknya respon yang bermacam-macam dari masyarakat baik itu ketidak setujuan maupun setuju dengan kebijakan atau perda yang dibuat oleh pemerintah.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan masih jauh dari kata maksimal bahkan pada daerah yang jauh dari pusat pemerintahan sosialisasi belum dilaksanakan seperti daerah di perbatasan antara Way Kanan Dan Sumatera Selatan dan Daerah Way Kanan yang berbatasan langsung dengan Lampung Barat, didaerah yang sangat jauh dari pusat pemerintahan ini ada beberapa faktor yang menghambat kebijakan atau perda kewenangan kampung sulit untuk disosialisasikan yang *Pertama*, yaitu jauh dari pusat pemerintahan. *Kedua*, minimnya akses kedaerah tersebut ditambah dengan infrastruktur jalan yang rusak dan *Ketiga*, tingkat pendidikan dimasyarakat masih sangat rendah.

⁶ www.pemdawaykanan.co.id/perdakewenangkampung/keputusan/2016.

Realisasi kebijakan yang tidak merata seperti yang diutarakan oleh salah satu masyarakat yang berada di Kampung Tanjung Jaya yaitu Ebet, beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya perda kewenangan kampung tetapi desanya belum merasakan dampak dari adanya perda tersebut dan beliau berpendapat bahwa hambatannya karena kampung tanjung jaya ini sangat jauh dari pusat pemerintah kabupaten ditambah dengan infrastrukturnya kurang memadai⁷. Penjelasan diatas masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan perlu waktu lama untuk merasakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, berbeda dengan masyarakat yang berada dekat dengan pusat pemerintahan, Kecamatan Rebang Tangkas merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan Dan Lampung Barat, dapat dilihat bahwa kecamatan ini merupakan kecamatan yang sangat jauh dari pusat pemerintah dan tentu saja dengan kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintah berimbas pada kebijakan Pemerintah Way Kanan akan lamban terealisasi di kecamatan ini.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa kampung berperan penuh dengan adanya kewenangan kampung maka permasalahan yang terdapat dimasyarakat dapat langsung ditangani tetapi hal ini berbanding terbalik, di Kecamatan Rebang Tangkas selain sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten tidak maksimal ditambah dengan minimnya pungsi kampung ini ditandai dengan dibeberapa kampung yang terdapat masih banyak warga yang belum mengetahui tentang adanya perda terutama

⁷ wawancara dengan ebet tanggal 08 semtember 2016 dikantor kampung tanjung jaya

warga yang jauh dari pusat pemerintahan desa, contoh masyarakat yang tinggal diperkebunan, masyarakat yang tinggal dipegunungan Bukit Punggur dan masyarakat yang diperbatasan. Karena setelah melakukan pra survey penelitian penulis menemukan masih banyak masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan mengenai perda kewenangan kampung ini, kemudian seperti pernyataan masyarakat di tiga kampung terluar yaitu Kampung Air Ringkih, Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Seluwai, masyarakat di ketiga kampung masih banyak mengeluhkan tentang peran kampung yang masih sangat minim seperti masih susah untuk urusan administrasi, pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang masih sangat lamban dan bahkan di Kampung Gunung Sari beberapa masyarakat mengutarakan bahwa ada kesan menyembunyikan dan masyarakat tidak diberi secara utuh tentang kegunaan perda kewenangan kampung tersebut.

Peralisasian perda kewenangan kampung yang tidak semuanya kesalahan pemerintah tetapi juga penulis menemukan dalam penelitian bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai perda kewenangan kampung, tidak tahu tentang perda kewenangan kampung dan tidak peduli dengan perda kewenangan kampung penulis berpendapat demikian dilandasi oleh pendapat bapak mad zendra selaku sekdes kampung Lebak Peniangan yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak datang ketika diadakan sosialisasi dikantor kampung.⁸ Menurut data dari kecamatan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang

⁸Wawancara dengan bapak mad zendra, 10 januari 2018 dikantor kampung lebak peniangan

dibuat pemerintah masih sangat rendah hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran yang rendah yaitu hanya sebesar rata setiap desa hanya 34,78 %.⁹ Dari data ini kita dapat menilai bahwa perealisasiian suatu perda haruslah memiliki komponen yang lengkap agar perda yang telah dibuat dapat direalisasikan secara maksimal.

D. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu apakah penyebab tidak maksimalnya implementasi perda kewenangan kampung ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perda kewenangan kampung yang dibuat oleh pemerintah Way Kanan sudah terealisasi secara maksimal ataukah belum maksimal.

F. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memperbanyak kajian mengenai tingkat pemahaman kebijakan yang diterapkan.

Karena masyarakat dan meningkatkan pemaham mengenai peran dari pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

Mememberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk peduli dengan apa yang dilakukan pemerintah baik tentang perda mau pun berpub karena dengan masyarakat yang memiliki peran aktif akan membuat perda terealisasi secara maksimal.

⁹ Arsip penyuluhan kecamatan Rebang Tangkas 14 januari 2018

G. Metode Penelitian

Semua jenis penelitian yang dilakukan sejauh ini tidak bisa lepas dari metode penelitian. Karena metode penelitian adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data-data akurat dan sesuai permasalahan yang sedang diteliti, pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, merupakan jenis penelitian yang menuntut penggunanya mendiskripsikan suatu penelitian melalui analisi yang disertai dengan teori teori yang dibutuhkan oleh penelitian tersebut.¹⁰

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “*field research*”. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat atau berbaaur secara lansung dengan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rebang Tangkas pada dasarnya untuk menemukan secara kongkrit permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah way kanan dalam merealisasikan perda kewenangan kampung tersebut.¹¹

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat observatif objektif, adalah penelitian yang mengharuskan peneliti mengobservasi langsung objeknya yaitu masyarakat dengan cara ikut dan

¹⁰Affuddin dan beni ahmad, *metode penelitian kualitatif*, (bandung : pustaka setia. 2009), h.87

¹¹Kartini kartono, *metodelogi riset social*, (bandung: mandar maju. 1996), h. 32-33.

merasa langsung keluh-kesah atau permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian mengambil sampel dan satu populasi yang ada dan menggunakan wawancara sebagai alat pokok pengumpul data. Dengan responden yang sudah ditentukan oleh peneliti itu sendiri¹².

H. Sumber data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang langsung bersangkutan pada keperluan penelitiannya.¹³ Dalam ini penulis menggunakan wawancara sebagai data primer serta menggunakan masyarakat yang ada di Kecamatan Rebang Tangkas sebagai responden dari penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia, umumnya sudah dikumpulkan, diolah, disajikan dan dibublikasikan oleh lembaga atau instansi terkait.¹⁴ Data sekunder adalah penyempurna dari data primer yang diperoleh dari

¹²*Ibid.* h 23

¹³m. Iqbal hasan, *pokok-pokok metodologi penelitian dalam pengaplikasian perda*, (bogor: ghalia Indonesia, 2002), h. 81.

¹⁴*ibid*

buku-buku, literatur, jurnal dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini seperti data yang ada di Kecamatan Rebang Tangkas, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku tentang peraturan daerah dan buku tentang kewenangan kampung.

Data primer atau pun data sekunder dipergunakan untuk saling menyempurnakan, karena data dari lapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data dari perpustakaan. Dengan dipergunakannya kedua sumber data tersebut maka kebenaran sumber data dapat pertanggungjawabkan.

I. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data-data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Wawancara (Interview)

Interview yang lebih populer dengan sebutan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara guna untuk memperoleh informasi atau data dari responden semua sudah terperinci sama dengan yang dimaksud interview terstruktur.¹⁵ Dengan teknik ini akan lebih memberikan peluang yang sewajarnya kepada responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam dan untuk menentukan *key informen* penulis menggunakan teknik purposive sampling yang mana seorang peneliti percaya bahwa mereka dapat

¹⁵Saifudin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 40.

menggunakan pertimbangan atau intuisinya untuk memilih orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau yang dapat memberikan informasi yang akurat. Suatu kelompok dengan sebutan *“the typical and the best people”* yang akan dipertimbangkan oleh para peneliti untuk diambil menjadi subjek penelitian. Para responden yang dinilai memberikan informasi yang lebih mendalam dan unik, adalah para responden yang dibutuhkan oleh peneliti. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat kita pahami bahwa purposive sampling memiliki intisari penjelasan dimana kelompok yang dipilih secara cermat, dan kelompok yang terbaik, akan dipilih menjadi responden penelitian. Oleh karena itu, purposive sampling juga memiliki istilah yang lain yaitu judgemental sampling. Sebab memerlukan adanya pertimbangan yang matang untuk memilih kelompok utama menjadi sebuah sampling¹⁶. Maka dari itu penulis memilih responden yang mempunyai kapabilitas terhadap perda kewenangan kampung tersebut. Meliputi tim sosialisasi, aparatur kecamatan, aparatur kampung, aparatur, masyarakat. yang terdiri dari beberapa orang sebagai berikut :

a. Aparatur Kecamatan

No	Nama	Status	Pekerjaan
1	Ali Wiyono	Aparatur Kampung	Sekretaris Desa
2	Jhon	Aparatur Kampung	Kepala Kampung
3	Mulyadi	Aparatur Kampung	Kepala Kampung
4	Tri Wanto	Aparatur Kampung	Kepala Kampung

¹⁶Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung : Alfabeta. 2010), H. 73

b. Masyarakat

No	Nama	Status	Pekerjaan
1	Indah Suryani	Masyarakat	Guru
2	Jono	Masyarakat	Wiraswasta
3	Samsi	Masyarakat	Petani
4	Eko	Masyarakat	Guru
5	Tukiman Ngalimun	Masyarakat	Wiraswasta
6	Fatur Rohman	Masyarakat	PNS
7	Rindi Setiowati	Masyarakat	Pengawai Polsek
8	Sukma Wati	Masyarakat	Kepala Sekolah
8	Darsan	Masyarakat	Petani
10	H.Sadarman	Masyarakat	Wiraswasta
11	Elmi	Masyarakat	Wiraswasta

c. Aparatur Kecamatan

No	Nama	Status	Pekerjaan
1	Hery	Aparatur Kecamatan	Pegawai Kecamatan
2	Naknung	Aparatur Kecamatan	Humas

d. Tim Sosialisasi

No	Nama	Status	Pekerjaan
1	Biyanto	Tim Sosialisasi	Anggota
2	Mad Zendra	Tim Sosialisasi	Ketua
3	Taman	Tim Sosialisasi	Anggota

e. Observasi (Observation)

Pengamatan langsung (*observation*). yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti atau dengan kata lain peneliti langsung mengamati objek penelitian secara langsung ditempat terjadinya permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek pengamatan adalah masyarakat di Kecamatan Rebang Tangkas

f. Dokumentasi

Sebagai objek yang dapat diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, kita menyatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan orang (people), dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita memakai metode dokumentasi. Asal kata dokumentasi yaitu dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan penelitian dengan metode dokumentasi, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, dan sebagainya.¹⁷

Cara mengumpulkan dokumen dalam penelitian ini adalah yang pertama mencari dokumen yang dibutuhkan, yang kedua setelah data didapatkan kemudian dipilih mana yang berhubungan dengan penelitian, yang ketiga setelah didapat data dari pemilihan kemudian dimasukan kedalam penelitian untuk ditindak lebih lanjut.

¹⁷Van hoeve, terjemahan hasan shadily, *ensiklopedia Indonesia*, jilid 7 (Jakarta: ichitiar baru, 2014), h. 849.

J. Metode analisis data

Setelah semua data terkumpul sesuai dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, maka selanjutnya langkah yang di proses adalah menghimpun mengelolah dan memilah data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk di analisa. Data yang didapat dari lapangan dianalisa dengan menggunakan tehnik kualitatif. Analisa kualitatif yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dan umumnya diproses sebelum diap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan atau alih tulis). Teknik analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).¹⁸

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa yang ada di generelisasi secara keseluruhan. Analisa deskriptif pada penelitian ini digunakan karena analisa deskriptif mengurai dan merinci kalimat-kalimat yang ada. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar jawaban dari permasalahan menggunakan cara pendekatan berfikir deduktif. Deduktif adalah berangkat dari hal yang umum kemudian ditarik

¹⁸Saifudin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 40.

kesimpulan menuju hal yang khusus dengan menggunakan logika atau penalaran yang juga sering disebut rasio (rasionalitas pemikiran).¹⁹ Maksud dari metode yang dipaparkan ini adalah menganalisa menggunakan data-data yang ada baik dari lapangan ataupun pepustakaan kemudian dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian.

K. Tinjauan Pustaka

Skripsi Penelitian yang berjudul implementasi perda kota tangerang tentang pelanggaran PSK disusun oleh ely Lusiana dan penelitian ini di beri judul Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Pebedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti teletak pada membahasan yang lebih terkonsentrasi pada perda sosial yaitu perda tentang pelarangan prostitusi.

Tesis Penelitian yang berjudul respon masyarakat implementasi asuransi syariah dikota mataram yang dilakukan oleh Muhammad Johari di UIN Sunan Kalijaga tahun 2006 pada penelitian ini konsentrasi atau pokok pembahas terfokus pada ekonomi yang berbasis islam atau lebih sering disebut ekonomi syariah berbeda yang penelitian yang penulis teliti yang lebih terfokus pada tingkat keberhasilan suatu peraturan

¹⁹Nana sudjana, *karya ilmiah*, (Bandung: sinar baru, 1991), h. 6.

Jurnal mengenai implementasi perda Pembangunan Gedung di Kota Samarinda yang dibuat Salahudin tahun 2014 dalam penelitian ini penulis yaitu Salahudin membahas tentang perda pembangunan gedung yang berfokus pada bidang infrastruktur dalam bentuk bangunan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang perda kewenangan kampung yang mencakup segala aspek termasuk tentang pengelolaan dana, pemeliharaan infrastruktur, peraturan desa dan pelestarian adat istiadat.

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah kejadian yang nyata akibat dari hal yang dibuat dengan tujuan tertentu baik menertibkan, menyejahterakan ,maupun memcegah serta menaggulangi permasalahan yang terjadi yang selaras dengan pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian²⁰

Pendapat lain menyatakan implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan

²⁰ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2005). h. 23

implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut serta bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.²¹ Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.²² disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa setiap kebijakan yang akan di realisasikan kepada masyarakat harus memiliki komponen yang lengkap. Dan hal yang menyangkut pemerintah desa bukan merupakan hal yang sederhana namun urusan mengenai desa adalah hal yang sangat penting karena kesuksesan suatu kebijakan dapat diukur keberhasilannya dengan cara melihat keberhasilan kebijakan kampung sebagai aparaturnya yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

²¹ Syaekani, dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2003). h. 67

²² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007). h. 14

b. Teori implemetasi kebijakan

Teori implementasi kebijakan merupakan langkah-langkah yang harus diperhatikan guna untuk membuat sebuah kebijakan yang maksimal dalam perealisasinya maka dari itu setiap bagian merupakan hal yang penting dan sangat berpengaruh untuk memaksimalkan sebuah kebijakan.²³ Terdapat 4 point yaitu :

1. Komunikasi

Implementasi akan terlaksana secara maksimal apabila mengkomunikasikan hal-hal terlebih dahulu karena Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dan menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁴ Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui

²³ Edwards III, George C, *Implementing Public Policy*, (Washington: Congressional Quarterly Inc, 1980). h. 146

²⁴ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya 2008). h. 78

sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran dan dapat menyebabkan kegagalan dalam perealisasiian suatu kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial/dana.²⁵

3. Disposisi

Kejujuran merupakan hal pokok dalam mensukseskan sebuah kebijakan karena Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan.²⁶ maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dan disposisi ini juga terindikasi ada pada perda kewenangan kampung.

²⁵ Nugroho D Riant, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputendo, 2004), h. 97

²⁶ Dunn William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi ke III) (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 72

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP).²⁷ SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengacu pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²⁸ Dan dari teori ini penulis dapat mendapatkan dan menentukan data lebih mudah menentukan apakah perda kewenangan kampung ini memiliki struktur yang baik atau struktur nya terlalu panjang.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Hal yang juga sangat penting dan harus diperhatikan adalah tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Di tahap implementasi

²⁷ Lukman, Sampara, *Manajemen kualitas pelayanan*, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000), h. 50

²⁸ Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 41

kebijakan ini akan dapat dipahami bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan baik dari sisi sosial, ekonomi, politik budaya dan lingkungan masyarakat. Pendapat lain mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:²⁹

1) Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objecties*)

implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

²⁹ Agus eko sujianto, *aplikasi statistik dengan SPSS 16,0* (Jakarta:prestasi, 2009), h. 35

2) Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

3) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

(Interorganizational Communication and enforcement Activities)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional

dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

4) Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*).

Struktur birokrasi dianggap karakteristik norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dalam proses implementasi. Implementasi adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah ditentukan pada keputusan kebijakan. Sumberdaya pelaksana validitas organisasi tingkat komunikasi terbuka yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

d. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol), Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama. walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- a. Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- b. Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- c. Bagaimana sifat umum seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
- d. Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- e. Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

e. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Elemen ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan, Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu Kognisi (pemahaman dan pengetahuan), Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak dan Intensitas dari respon pelaksana.

Elemen-elemen yang diutarakan oleh Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran Dengan demikian akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran, ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan

pelaksananya. Pendapat lain mengetakan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu setelah kebijakan ditransformasikan maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat Implementability dari kebijakan tersebut isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan dan siapa pelaksana program. Sementara itu situasi implementasinya merupakan Kekuasaan kepentingan dan aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga penguasa dan Keputusan dan daya tanggap.³⁰

³⁰ D. raint nugroho, *kebijakan public untuk Negara-negara berkembang* (Jakarta: alex media kompertindo2003), h. 174

BAB III

PROFIL REBANG TANGKAS DAN PERDA KEWENANGAN KAMPUNG

A. Sejarah Kecamatan Rebang Tangkas

Kecamatan Rebang Tangkas merupakan kecamatan baru dikabupaten Way Kanan. Kecamatan Rebang Tangkas merupakan hasil pemekaran dari kecamatan kasui dengan SK No. 1 Tahun 2002 dan diresmikan menjadi kecamatan rebang tangkas pada 10 april 2002.³¹ sebagai kecamatan baru Rebang Tangkas masih baru berproses untuk mensejajarkan diri dengan dengan kecamatan lain yang telah lebih dahulu terbentuk, seperti dua kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Kasui dan Kecamatan Banjit, awal terbantuknya kecamatan Rebang Tangkas dikarenakan kecamatan Kasui yang sudah tidak memadai untuk menjadi satu kecamatan karena terlalu luas dan ditambah dengan jarak wilayah yang sekarang ini menjadi wilayah Kecamatan Rebang Tangkas sekitar satu jam dengan infrastruktur yang sangat buruk, serta wilayah rebang tangkas memiliki potensi yang bagus dibidang pertanian dan peternakan yang sekarang menjadi komoditas unggulan dari kecamatan Kebang Tangkas diantaranya yaitu perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan karet, dan buah naga. Dibidang perternakan yaitu peternakan ayam boiler, peternakan sapi pedaging, dan peternakan ikan air tawar.³² Selain kedua unggulan diatas ada

³¹ Data diberikan langsung oleh sekertaris kecamatan rebang tangkas bapak tamam, pada tanggal 5 maret 2018, lokasi di kantor kecamatan rebang tangkas

³² Arsip data kecamatan rebang tangkas tahun 2002, h. 8

beberapa potensi yang peneliti lihat di Kecamatan Rebang Tangkas yaitu, dibidang pariwisata dan kuliner, dan tentu ini selaras dengan perda kewenangan kampung No 7 tahun 2016 berisi tentang pemberian kewenangan pada kampung yang meliputi pengelolaan dana, pemeliharaan infrastruktur, peraturan kampung dan pelestarian adat istiadat. Dan wewenang tersebut diberikan secara penuh kepada kampung. potensi yang ada tersebut dapat dimaksimalkan.

B. Luas Wilayah

Secara topografi sebagian besar wilayah kecamatan Rebang Tangkas terdiri dari dataran tinggi atau perbukitan yang terletak dikaki bukit barisan tepatnya di register 24 bukit punggur. Secara geografis kecamatan rebang tangkas berbatasan dengan Sumatera Selatan di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Kasui disebelah selatan, berbatasan Dengan Kecamatan Blambangan Umpu disebelah timur dan Lampung Barat di sebelah barat serta memiliki luas wilayah 185100 km² terdiri dari 1.82% tanah persawahan, 21.85% tanah perladangan, 46.64% tanah perkebunan 29.11% tanah hutan.³³

C. Wilayah Administrasi

Gambaran umum secara Secara keseluruhan wilayah administrasi kecamatan rebang tangkas terdapat 10 kampung yang terdiri dari 67 dusun, 130 RT, dengan jumlah penduduk keseluruhan yaitu 24977 jiwa yang terdiri dari laki-laki 11864 jiwa dan perempuan 13083 dan 2288 KPM dan penduduk yang berpendidikan dari S1

³³ Dokumen tim penyuluhan rebang tangkas tahun 2018 dikantor kecamatan rebang tangkas

sampai SMA 751 dan penduduk berpendidikan SMP sampai TK 24226.³⁴ Dengan pusat kecamatan berada di kampung Gunung Sari, perkebunan terbesar kelapa sawit di kampung Madang Jaya, perkebunan terbesar kopi terbesar dikampung Lebak Peniangan dan pusat ekonomi dikampung Lebak peniangan dan kampung Tanjung Tiga. Serta daerah pengunungan yang didominasi oleh perkebunan kopi yang masih berstatus kawasan yang sebenarnya tidak diizinkan untuk dikelola oleh masyarakat, karena wilayah kawasan hanya diperuntukan untuk hutan. Secara lebih jelas akan diterangkan pada Table Wilayah Administrasi yang terdapat pada lampiran.

D. PERDA KEWENANGAN KAMPUNG

Perda kewenangan kampung merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan No 7 tahun 2016 berisi tentang pemberian kewenangan pada kampung yang meliputi pengelolaan dana, pemeliharaan infrastruktur, peraturan kampung dan pelestarian adat istiadat. Dan wewenang tersebut diberikan secara penuh kepada kampung.³⁵ Perda ini adalah implementasi dari program unggulan Bupati Way Kanan yaitu tentang kampung mandiri dan pemberdayaan kampung yang menjadi point penting ketiga dari program unggulan Bupati Way Kanan dan perda kewenangan kampung merupakan wujud dari program yang dirancang oleh Bupati Way Kanan yang berisi tentang peran kampung memiliki hak lebih untuk mengatur

³⁴ Arsip data kecamatan rebang tangkas tahun 2017, h. 12

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010). h 164.

dan mengelolah kampungnya sendiri dan sebelum perda ini di sahkan sudah ada perda yang telah disahkan terlebih dahulu yaitu perda No 4 tahun 2016 yaitu tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah kampung untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Kekhususan kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan kampung, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan kampung, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat kampung yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat kampung.³⁶

Dalam Pasal 19 dan 103 UU kampung/Desa disebutkan, kampung dan kampung Adat mempunyai empat kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung, kewenangan lokal berskala kampung dimana kampung mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus kampungnya. Berbeda dengan perundan-gundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada

³⁶M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, (Jakarta : kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 11

kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada UU NO. 6 Tahun 2014 menegaskan dalam pasal 1 ayat 1 kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Perda kewenangan kampung merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 pasal ayat 12 tentang wewenang desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

³⁷ Undang-Undang Dasar Tentang Kewenangan Desa Pasal 19 Dan 103

³⁸ UU No. 6 tahun 2014, pasal 1 ayat 1. Tentang kewenangan kampung.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERDA KEWENANGAN KAMPUNG

Peraturan daerah atau yang biasa disingkat perda adalah suatu hasil dari kinerja pemerintah yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat karena melalui perdalah pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang sudah dirancang dan disahkan sebelumnya, dan perda bukan hanya sebagai alat untuk menguntungkan suatu pihak tetapi lebih luas lagi perda perpungsi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan penyimpangan yang terjadi dimasyarakat dan selain itu pungsi perda juga ialah sebagai control atau kendali sosial baik untuk memperbaiki tatanan yang ada dimasyarakat atau sebagai pembuat tatanan baru, tatanan yang di maksud disini contohnya sebuah kebijakan yang kurang baik diganti dengan kebijakan yang baru atau kebijakan yang sudah baik namun diganti untuk menciptakan situasi dan kondisi yang baru pada masyarakat. pada perda kewenangan kampung adalah yang kurang efektif dan kurang maksimal karena ada beberapa faktor yang menghambat perda kewenangan kampung ini untuk dapat terrealisasi secara maksimal di antaranya yaitu faktor dari masyarakat, faktor dari pemerintah, faktor dari geografis dan kurangnya transparansi aparatur kampung, masih banyak lagi faktor-faktor yang menghambat dan alasan penulis memilih faktor faktor diatas karena menurut penulis keempat dapat mewakili semua hambatan yang ada pada perda kewenangan kampung yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Way Kanan dan untuk faktor pendorong yang dapat menyusutkan perda ini yaitu komunikasi, transparansi, dan tingkat

kepedulian serta pengetahuan tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada masyarakat di Kecamatan Rebang Tangka. Dan dari ketujuh faktor diatas maka dapat diketahui bagaimana perda kewenangan kampung sudah terealisasi.

a) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan suatu system, organisasi ataupun peraturan seolah ditarik mundur dan sulit untuk berkembang seakan perubahan kerarah yang lebih maju adalah yang sangat sulit dilakukan dan faktor penghambat menjadi inisiator kegagalan utama dalam penerapan suatu peraturan. Didalam penelitian ini ada empat faktor penghambat sebagai berikut :

1) Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah faktor utama penghambat dari perda kewenangan kampung, seperti kita ketahui bahwa pendidikan masyarakat di Negara Indonesia belum merata dan tentu saja dari hal tersebut membuat tingkat intelektualitas masyarakat berbeda-beda dan membuat masyarakat belum begitu banyak yang mengerti tentang peraturan daerah yang diterapkan oleh pemerintah, karena hal tersebut banyak masyarakat yang acuh bahkan tidak mengetahui tentang perda yang dibuat pemerintah seperti wawancara yang saya lakukan pada beberapa masyarakat di kecamatan rebang tangkas beberapa menyatakan tidak tahu sama sekali dengan adanya perda kewenangan kampung, pendapat kedua menyatakan bahwa hanya tahu tapi tidak paham fungsi dari perda kewenangan kampung tersebut, pendapat ketiga

mengetahui dan paham dengan adanya perda kewenangan kampung. Dan kebanyakan yang mengetahui dan paham mengenai perda kewenangan kampung adalah masyarakat dari kalangan menengah keatas seperti guru, pengusaha dan pelajar. Seperti yang penulis dapati bahwa struktur masyarakat di Kecamatan Rebang Tangkas ada dua yaitu para buruh dan para juragan, Kabupaten Way Kanan adalah daerah pertanian dan peternakan tetapi system di Kabupaten Way Kanan pertain adalah orang yang punya lahan dan para buruh adalah para pekerja jadi yang jadwalnya berangkat pagi pulang sore jadi mereka tidak tahu sama sekali tentang perda atau apapun mengenai kebijakn yang seharusnya dapat membuat mereka sejahtera jadi seperti yang diungkap salah satu pekerja buruh kasar yaitu bapak Darsan yang menyatakan bahwa kalau orang seperti kami ini tidak akan mengetahui tentang kebijakan dari pemerintah karena kami tidak ada waktu untuk mengetahui peraturan atau kebijakan yang diterapkan bahkan perhatian pemerintah pada kamipun masih dirasa sangat kurang.³⁹ dan Maka dari itu Sumber daya merupakan hal yang sangat penting karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial/dana.⁴⁰ Maka dari itu sebuah kebijakan dapat berjalan secara maksimal apabila sumber daya manusianya mumpuni untuk menerapkan sebuah kebijakan. Dan

³⁹Wawancara dengan bapak Darsan, 12 maretr 2018 di pasar gincing.

⁴⁰*Op.cit. h .97*

selain membuat perda yang baik juga harus diimbangi dengan kebijakan dibidang pendidikan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak peduli dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Masyarakat di kecamatan Rebang Tangkas tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintahnya ini diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Lebak Peniangan yaitu Bapak Tri Wanto yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat pemerintah desa masih sangat kurang. Terutama soal dana desa. Karena menurut masyarakat bahwa perda kewenangan kampung terlalu memberikan kebebasan kepada pemerintah kampung⁴¹. Menurut An-Nabhani, mengatakan masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem/aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat⁴². dari rujukan diatas maka kita dapat memberi penilaian bahwa masyarakat belum mengerti apa artinya sebuah sistem masyarakat bahwa perda kewenangan kampung tidak akan bisa diterapkan secara maksimal jikalau masyarakatnyapun tidak peduli dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan. Seperti yang diungkapkan oleh aparatur apartur yaitu Bapak Mulyadi, beliau menyatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Rebang Tangkas kurang proaktif terhadap kebijakan yang akan diberlakukan, beliau mennyatakan bahwa setiap sosialisasi yang dilakukan oleh

⁴¹Wawancara dengan bapak Tri Wanto, 30 maret 2018 di kantor kampung lebak peniangan.

⁴² An-Nabhani, *Taqiyyuddin, Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor : Psutaka Thariqul Izzah,2003). h. 58

pemerintah antusias warga sangat kurang bahkan dalam rapat kampung yang melibatkan masyarakat antusiasnya masih sangat rendah. Namun warga pun memiliki alasan untuk tidak hadir ketika sosialisasi seperti yang diungkapkan oleh bapak Jono, pada intinya beliau menyatakan bahwa masyarakat tidak bisa hadir karena memiliki kesibukan yang lebih penting seperti pergi keladang, mencari pakan ternak, menyadap getah karet dan lain-lain dan beliau juga berpendapat bahwa pemerintah kurang serius dalam melakukan sosialisasi terhadap perda kewenangan kampung tersebut yang ditandai dengan sosialisasi yang dilakukan terjadwal dan sosialisasi yang dilakukan tidak ada pemberitahuan⁴³.

2) Faktor Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan eksekutif, pengaturan badan legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahnya dalam segala peristiwa & gejala pemerintahan⁴⁴. Pemerintahan harus berperan aktif dalam melaksanakan suatu kebijakan tentu sebagai pemerintah yang telah dipercaya oleh rakyat, tentu sebagai aparat pemerintah dari tingkat kampung sampai kabupaten harus berperan serta dalam melaksanakan sebuah kebijakan namun bukan hal yang mudah untuk melaksanakan sebuah kebijakan dalam hal ini perda kewenangan kampung sebagai

⁴³Wawancara dengan bapak Jono, 29 maret 2018 di desa air ringkih.

⁴⁴Inu kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2005).

perda yang cukup kompleks dan sebagai pemerintah tentu saja sebelum membuat suatu kebijakan sudah melalui tahapan pembuatan salah satunya yaitu relevan atau tidak diterapkan pada masyarakat perda kewenangan kampung yang berisi tentang pengelolaan dana, pemeliharaan infrastruktur, peraturan kampung dan pelestarian adat istiadat. Dari isi perda kewenangan kampung diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah harus berperan aktif. pemerintah kampung yang merupakan pengelola kebijakan dari pemerintah kabupaten harus menjadi memiliki wewenang penuh terhadap perda kewenangan kampung dan pemerintah kampung harus menjaga relasi pada masyarakat agar kebijakan yang dibuat tidak mengalami kegagalan serta membuat masyarakat peduli dan proaktif terhadap perda kewenangan kampung yang akan diterapkan. Sesuai dengan teori kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah yang membuat kebijakan murni untuk kepentingan rakyat pasti akan terrealisasi dengan sukses namun apabila ada indikasi lain dalam pembuatan kebijakan atau kepentingan lain pada suatu kelompok maka kebijakan tersebut tidak akan terrealisasi dengan sukses.

Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten⁴⁵. Otoritas yang dimaksud disini adalah pemerintah

⁴⁵DwiyantoIndiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2009).h .28

yang harus konsisten dalam upaya perrealisasi perda kewenangan kampung karena keberhasilan suatu perda terletak pada konsistensi suatu pemerintahan dalam membuat dan mengimplentasikan suatu perda. Dan tentu sumber daya yang ada pun harus memadai, sumber daya disini bukan hanya dari manusia saja namun juga dari sisi finansial atau dana seperti teori implentasi yaitu Sumber daya merupakan hal yang sangat penting karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial atau dana.⁴⁶

3) Faktor Geografi

Kondisi geografi suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna serta sumber daya alamnya. Letak suatu wilayah berhubungan dengan lokasi, posisi batas, bentuk dan luas⁴⁷. Pada kabupaten Way Kanan sebagian kondisi geografi terdiri dari pertanian perternakan dan lingkungan geografinya terdiri dari pegunungan, sungai, hutan, perkebunan dan perkampungan. Karena daerah pegunungan wilayah kabupaten Way Kanan sangat lah subur dan memiliki potensi yang besar namun kondisi pegunungan ini pula yang menjadi hambatan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan, sebuah kampung

⁴⁶*Op.cit. h. 97*

⁴⁷R Bintarto, dan Hadi Sumarno Surastopo, *Metode Analisa Geografi*,(LP3SES : Jakarta,1986).h. 30

dengan kampung lainnya di daerah Way Kanan tidak terlalu jauh namun yang menjadi kendala yaitu medan yang akan dihadapi dengan infrastruktur yang baru akan bangkit tentu pembangunan belum merata dan itu menjadi salah satu tantangan yang cukup berat untuk dihadapi seperti yang diutarakan oleh bapak Tamam selaku tim penyuluhan dari kecamatan, beliau menyatakan bahwa kondisi geografi menjadi tantangan terbesar, bahkan untuk melakukan sosialisasi ke dusun yang jauh dan kondisi ditambah dengan infrastruktur jalan yang sangat tidak memadai sangatlah berat bahkan untuk kedusun satu dengan dusun yang lain memerlukan waktu yang cukup lama beliau menambahkan contohnya Dusun Seluwai yang berada di Kampung Lebak Peniangan dan Dusun Tami Renik yang juga berada di Kampung Lebak Peniangan jarak hampir satu jam perjalanan dan hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua atau motor⁴⁸. Dan kondisi geografis ini juga mempengaruhi masyarakat untuk tidak peduli dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pola pikir masyarakat di kecamatan Rebang Tangkas masih sangatlah tertinggal bahkan mereka cenderung terbelakang bahkan petika penulis mengunjungi dusun-dusun yang ada di kecamatan Rebang Tangkas masih banyak remaja yang berumur dari 17 tahun sampai 20 tahun yang tidak lulus SD dan saat diwawancara salah satunya bernama Samsi menyatakan bahwa alasan mereka putus sekolah adalah antara sekolah dan rumah sangat jauh dan harus melewati lembah terlebih dahulu⁴⁹. Dan

⁴⁸Wawancara dengan bapak Tamam, 30 september 2018 di kantor Kecamatan Rebang Tangkas.

⁴⁹Wawancara dengan saudara Samsi, 28 september 2018 di kawasan perkebunan Bindu.

membuat mereka tidak tahu dengan perda kewenangan kampung bahkan ada yang tidak bisa baca tulis.

Bahkan kondisi juga yang menyebabkan beberapa sosialisasi yang akan dilakukan menjadi gagal karena banyak masyarakat tidak hadir dan alasan mereka tidak hadir karena antara rumah mereka dan balai kampung dan rumah mereka bahkan dari dusun Talang Jengkol ke balai kampung yaitu kampung Bringin Jaya itu berjarak dua jam bahkan salah satu guru honorer yaitu bapak Eko menyatakan bahwa letak tidak terlalu jauh tetapi masih banyak jalanan rusak bahkan masih tanah merah belum lagi kalau kondisi musim hujan jangan untuk kebalai kampung buat bekerja kesekolah saja tidak bisa⁵⁰. Dapat dilihat bahwa kondisi geografi way kanan cukup menghambat perrealisasian perda kewenangan kampung terutama dikecamatan Rebang Tangkas. tetapi penulis menyatakan semua daerah Way Kanan infrastrukturnya tidak baik namun di beberapa tempat sudah sangat bagus contohnya disekitaran rumah penulis sendiripun infrastruktur sudah sangat baik dan yang penulis wawancarai tersebut adalah warga yang berada dikampung yang jauh dari pusat kecamatan tetapi memang belum merata

Melihat dari penjelasan diatas bukan berarti perda kewenangan kampung yang dibuat oleh pemerintah Way Kanan gagal, hal ini dibuktikan dengan sektor pariwisata yang mulai berbenar, melihat kondisi geografis pegunungan ternyata membuat way kanan memiliki pemandangan yang sangat ini dan salah satunya

⁵⁰Wawancara dengan bapak Eko, 29 september 2018 di SMA N 1 Rebang Tangkas.

banyaknya air terjun di Way Kanan dan didalam perda kewenangan kampung yaitu ada point yang berisi dana desa dan salah satu hal yang tetap untuk mengalokasikan dana tersebut yaitu dengan memfaat air terjun sebagai tempat wisata dan tentu saja dengan dana dari desa melalui perda kewenangan kampung dapat membuat fasilitas untuk kenyamanan wisatawan. Dan kemudian perda ini juga mulai menampilkan hasil disektor infrastruktur salah satunya yaitu pembangunan jalan dibeberapa titik yang menjadi pusat ekonomi khususnya dikampung Lebak Peniangan dan kampung Gunung Sari. Serta mulai berbenah dibidang ekonomi dengan membuat perkebunan sawit, perkebunan karet dan peternakan ayam dan semua itu berasal dari bantuan desa melalui perda kewenangan kampung karena dibalik kondisi geografis yang sulit, tetapi tanah dan cuaca di kabupaten Way Kanan terutama kecamatan Rebang Tangkas sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat membuat, perkebunan peternakan dan perikanan. Dapat disimpulkan bahwa faktor geografis sangat menghambat tetapi kondisi lingkungan geografi dan infrastruktur yang kurang memadai dapat membuat keuntungan tersendiri bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satunya diungkapkan oleh bapak Tukiman Ngalimun yang menyatakan bahwa kondisi geografi daerah Way Kanan terutama kecamatan Rebang Tangkas sangat sulit tetapi melalui perda kewenangan kampung pemerintahan dikampung sudah membuatkan jembatan walau baru ada dibeberapa titik dan belum merata⁵¹.

4) Faktor Transparansi

⁵¹Wawancara dengan bapak Tukiman Ngalimun, 2 maret 2018 di kampung Lebak Peniangan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan transparansi menurut Mardiasmo yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat⁵². dari teori diatas semua komponen harus bergerak dan harus proaktif baik dari pemerintah sesuai dengan teori diatas masyarakat berfungsi sebagai pengawas dalam perrealisasian suatu kebijakan dalam hal ini yaitu perda kewenangan kampung, jadi perda disuatu daerah tidak dapat dinyatakan berhasil apabila masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang perda yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah haruslah terbuka kepada masyarakat dalam penerapan perda kewenangan kampung apalagi pada pada perda kewenangan kampung terdapat ini mengenai dana atau finansial yang dapat membuat stigma negatif dimasyarakat terhadap pemerintah dikarenakan tidak adanya transparansi dalam penerapan suatu kebijakan. Dan dikecamatan Rebang Tangkas transparansi itu belum sepenuhnya diterapkan seperti yang diungkapkan oleh salah satu kampung di kecamatan Rebang Tangkas yaitu gunung sari, bapak Fatur Rohman yang menyatakan bahwa pemerintah di kampungnya kurang transparan ini dapat dilihat dari tidak adanya keterangan mengenai dana dan kebijakan apa saja yang ada didalam perda kewenangan kampung dan ketika rapat kampung hanya membahas pengenalan perda

⁵²Mardiasmo, Otonomi dan *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta:ANDI,2002). h. 3

kewenangan namun isi dari perda tidak dibahas⁵³ hal yang serupa diungkapkan ibu Rindi Setiowati salah satu pegawai di polsek Rebang Tangkas yang menyatakan bahwa pemerintah terkesan menutupi apalagi apabila berbicara mengenai dana kampung yang telah diserahkan kekampung, beliau juga menambahkan bahwa bahkan ada adabanyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang isi dari perda kewenangan terutama di kampung yang letaknya jauh dari kecamatan seperti di kampung Karya Maju, kampung Mulya jaya dan kampung Tanjung Tiga beliau menambahkan bahwa mengetahui hal tersebut karena beliau selalu mengikuti sosialisasi di setiap kampung karena beliau bertugas sebagai pendamping dari polsek Rebang Tangkas⁵⁴. dari beberapa wawancara diatas dari transparansi kebebasan informasi masyarakat dikecamatan Rebang Tangkas belum memperoleh haknya secara penuh dari pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah dikampung-kampung yang ada dikecamatan Rebang Tangkasterutama yang berada jauh dari pusat kecamatan dan hal ini memperkuat bahwa implementasi perda kewenangan kampung belum terrealisasi dengan maksimal. Dan maksimalnya perda perda kewenangan kampung dapat diperoleh dengan adanya komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan seperti yang ada pada teori implemtasi komunikasi akan terlaksana secara maksimal apabila mengkomunikasikan hal-hal terlebih dahulu karena Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui

⁵³ Wawancara dengan bapak Fatur Rohman, 21 maret 2018 di kampung Gunung Sari

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Rindi Setiowatu, 9 maret 2018 di kantor kepolisian sektor Rebang Tangkas

apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.⁵⁵

b) Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan faktor yang sangat penting karena faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan suatu kebijakan, pada faktor pendorong terdapat system yang dapat menjadi kunci keberhasilan dan sesuai dengan teori Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai⁵⁶. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten⁵⁷. Dan ada 3 hal yang dapat menjadi faktor pendorong efektif dalam perealisasiian perda kewenangan kampung yaitu :

⁵⁵*Op.cit.* h. 78

⁵⁶Irfan MP Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan ke-15, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h. 38

⁵⁷Rusli, Budiman, *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, (Bandung: Hakim Publisher, 2013). h.93

1) Faktor Komunikasi

Komunikasi secara sederhana interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka dari ini komunikasi yang baik akan menjadi pendorong dalam perrealisasian perda kwenangan kampung karena komunikasi yang terjalin dengan baik antara masyarakat dan aparatur pemerintahan akan membuat situasi yang kondusif⁵⁸, dan perealisasiian perda kewenangan kampung dapat berjalan dengan maksimal namun apa bila terjadi miskomunikasi maka perda tersebut akan gagal untuk diterapkan. Seperti yang diutarakan oleh ibu Sukma Wati yang mnyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak terjadi secara baik ini ditandai dengan tidak harmonisnya hubungan antara aparatur kecamatan dan masyarakat serta masyarakat dengan aparatur kampung yang berawal dari permasalahan dana kampung yang tidak transparan dan banyaknya pengerjaan infrastruktur yang tidak sesuai seperti jadi perbaikan jalan yang semulanya semua jalan utama kampung akan diperbaiki namun pada kenyataanya hanya diperbaiki 2 km pada setiap kampung⁵⁹, namun hal itu langsung disanggah oleh salah satu aparatur kampung yaitu Ali Wiyono yang menyatakan bahwa setiap isi dari perda kewenangan kampung itu akan diterapkan seluruhnya namunbertahap sesuai apa yang penting dan dibutuhkan masyarakat⁶⁰, sedangkan salah satu aparatur

⁵⁸Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2006).
h. 17

⁵⁹Wawancara dengan ibu Sukma Wati, 15 februari 2018 di toko broto seno

⁶⁰Wawancara dengan bapak Ali Wiyono, 19 maret 2018 di kantor kampung Lebak Peniangan

kecamatan yaitu bapak Hery menyatakan bahwa perda kewenangan kampung tersebut memang sangat bagus untuk menunjang kesejahteraan dimasyarakat. Namun hal yang harus diperhatikan adalah masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan harus di dahulukan agar mereka memiliki akses untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru⁶¹. Dari ketiga pendapat tersebut penulis dapat menganalisa bahwa komunikasi yang terjadi masih sangat tidak baik, namun jika ditelaah secara detail maka akan menemukan satu persamaan yaitu mendahulukan yang lebih dibutuhkan dan apabila komunikasi ini terjalin dengan baik maka perda kewenangan kampung akan terealisasi secara maksimal.

Komunikasi juga dapat menjadi faktor pendorong yang sangat penting pada perda kenangan karena sosialisasi menjadi kunci agar implementasi perda kewenangan kampung dapat terealisasi secara merata baik pada wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan maupun wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan⁶², komunikasi juga sangat relevan apa bila ingin menjaga relasi antara masyarakat dan aparatur kampung, dalam komunikasi terjadi interaksi yang menimbulkan adanya pertukaran informasi satu sama lain dan dapat mengetahui apa keluhan pada masyarakat dan apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah⁶³, dalam mengimplentasikan perda kewenangan kampung, dan setelah saling mangetahui

⁶¹Wawancara dengan bapak Hery, 8 maret 2018 di kantor kecamatan Rebang Tangkas

⁶² Solichin Abdul Wahab Analisis Kebijakan, *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). h. 83

⁶³ Glasson, J, Pengantar Perencanaan Wilayah. Terjemahan, (Jakarta: Penerbit LPFE-UI, 2001).h .52

permasalahannya masing masing maka akan lebih mudah untuk membuat kesepakatan dalam mengimplementasikan perda kewenangan kampung tersebut. Namun komunikasi harus juga di imbangi dengan partisipasi masyarakat yang harus tinggi karena dengan banyaknya warga yang hadir pada setiap kegiatan sosialisasi yang dibuat pemerintah akan membuat masyarakat lebih mengenal perda yang akan diterapkan serta mengetahui fungsi dari perda tersebut. Penulis menganalisa demikian bukan berarti komunikasi yang dilakukan pemerintah gagal di setiap kampung karena di beberapa dusun yang tersebar di sepuluh kampung di kecamatan rebang tangkas komunikasi yang dilakukan aparat pemerintah dengan masyarakat cukup berhasil yaitu di kampung Madang Jaya lebih tepatnya dusun 6 Madang Jaya kemudian di kampung Beringin Jaya lebih tepatnya dusun 1 Beringin Jaya saat penulis melakukan wawancara di kampung-kampung tersebut masyarakatnya sangat proaktif minim komentar negative terhadap aparat kampung bahkan di kampung madang jaya terkesan memuji karena didalam jangka waktu yang cukup singkat setelah sosialisasi mengenai perda kewenangan kampung, kebijakan-kebijakan dari hasil sosialisasi perda kewenangan kampung langsung diterapkan. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Nalnung yang menyatakan bahwa pembangunan jalan-jalan diseluruh kampung, bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu melalui program kampung, pembangunan infrastruktur pendidikan dan bangunan milik kampung lainnya dilakukan tidak lama setelah adanya

sosialisasi⁶⁴. untuk di dusun Beringin jaya memang sedikit pelan pengimplementasian perda kewenangan kampung tersebut namun perlahan-lahan mulai tampak seperti mulai aktifnya sanggar-sanggar kesenian yang berada di kampung tersebut, pembangunan jalan yang terus dilakukan, serta membangun infrastruktur kampung yang terus dilakukan secara bertahap. Dan temuan yang cukup membuat penulis kagum adalah apapun kegiatan kampung, laporan dana kampung, pembangunan apa aja yang telah selesai, setiap jumat umumkan sebelum sholat jumat. Fakta ini didapat dari salah satu masyarakat di kampung tersebut yaitu bapak H. sadarman⁶⁵. Penulis dapat menganalisa bahwa komunikasi sebagai faktor pendorong merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengimplementasian perda kewenangan kampung, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan di beberapa kampung yang telah melakukan komunikasi secara baik terhadap masyarakatnya namun hal ini belum bisa dilakukan secara merata dan beberapa kampung yang sukses menjadikan komunikasi sebagai pendorong tersebut terletak tidak jauh dari pusat kecamatan dan hal itu juga mempengaruhi sehingga beberapa kampung tersebut memperoleh informasi secara cepat dan komunikasi antara pemerintah di kampung dan di kecamatan terjalin secara baik dan konsisten, penulis menyebutkan konsisten karena isi dari perda kewenangan kampung benar-benar diterapkan seperti pemeliharaan infrastruktur dan pelestarian ada yang berkesinambungan, walaupun ini belum merata namun

⁶⁴Wawancara dengan ibu Naknang, 13 maret 2018 di dusun 6 Madang Jaya

⁶⁵Wawancara dengan bapak H. Sadarman, 23 februari 2018 di balai kampung Beringin jaya

dibeberapa dusun yang ada dikecamatan Rebang Tangkas perda kewenangan kampung ini sudah berjalan dengan baik tentu ini merupakan kemajuan positif .

2) Faktor Transparansi

Faktor transparansi selain menjadi faktor penghambat tetapi juga dapat menjadi faktor pendukung yang dapat memaksimalkan perda kewenangan kampung dalam pengimplementasiannya, penulis menjadikan transparansi sebagai faktor penghambat dan pendorong dikarenakan beberapa hal seperti dengan transparansi secara menyeluruh dan membuka informasi kepada masyarakat akan membuat masyarakat mengetahui apa saja yang dialami pemerintah dan masyarakat dapat memberikan saran ataupun support dalam bentuk bantuan secara fisik maupun ide dan tranparansi seperti diatas merupakan tranparansi sebagai pendorong yang dapat meningkatkan pengimplementasian perda kewenangan kampung⁶⁶. Namun apabila transparansi yang dilakukan pemerintah sangat minim bahkan terkesan menutup-nutupi akan membuat masyarakat tidak peduli, geram bahkan protes dan transparansi itu termasuk transparansi yang menghambat pengimplementasian perda kewenangan kampung, dan pada transparansi yang dibahas pada topik adalah transparansi sebagai faktor pendorong, sebagai faktor pendorong transparansi harus dapat membuat perubahan yang lebih baik, dan apabila keterbukaan telah terbentuk baik dari masyarakat kepada aparatur pemerintahan dan ditambah dengan tingkat kepedulian masyarakat yang besar, ditambah dari sisi finansial cukup dan memadai

⁶⁶Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004). h. 75

bukan hal yang sulit untuk meng implementasikan perda kewenangan kampung. Transparansi merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan perda kewenangan kampung tersebut, karena implementasi dapat membentuk sikap saling percaya antara masyarakat dan aparatur pemerintahan. Hal tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Elmi yang menyatakan bahwa pemerintah dikampung terkesan menutup-nutup perda kewenangan kampung namun jika pemerintah lebih bersikap transparan maka masyarakatpun akan mendukung dan partisipasi terhadap kegiatan pemerintah akan sangat tinggi, dan jika sikap keterbukaan tersebut terwujud maka menerapkan perda kewenangankampung bukanlah pekerjaan yang berat⁶⁷.

Birokrasi yang menjalankan kebijakan publik secara transparan serta memberikan layanan informasi dengan baik, jelas akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) yang besar dari warga masyarakat. Makin menguatnya kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan, disanalah sesungguhnya menjadi ukuran legitimasi (pengakuan) yang bisa terbangun secara kokoh (secara formal maupun moral)⁶⁸. Dari penjelasan diatas kita dapat menganalisa dan dipadukan dengan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa transparan dari pemerintah kepada masyarakat dapat dibentuk melalui 3 hal pokok dan apabila hal tersebut dikuasai maka membentuk transparan

⁶⁷Wawancara dengan ibu Elmi, 20 maret 2018 di balai kampung Air Ringkih

⁶⁸Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (PT. Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011). 37

kepada masyarakat dapat dilakukan tentu saja alat yang dapat digunakan adalah birokrasi dan tingkat kepercayaan masyarakat dapat juga meningkatkan partisipasi masyarakat. dan pengakuan dari masyarakat terhadap pemerintah akan sangat membantu terlaksananya suatu kebijakan dan dalam hal ini yaitu perda kewenangan kampung, didalam perda kewenangan kampung memiliki hal-hal yang sangat kompleks dan transparansi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan baik secara formal dan moral dari masyarakat.

3) Faktor Partisipasi dan Pengetahuan

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengimplementasian perda kewenangan kampung karena tidak akan berhasil suatu kebijakan apabila tidak ada partisipasi dari pemerintah ataupun dari masyarakat yang menjadi objek implementasi suatu kebijakan. Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian⁶⁹. Jadi dari teori diatas maka kita menganalisa bahwa partisipasi adalah hal yang dapat mendorong dan membuat perda kewenangan kampung terealisasi secara maksimal karena didalam partisipasi antara masyarakat dan pemerintah harus ada keseimbangan dan apabila salah satunya yang lebih berpartisipasi dan salah satunya lebih pasif maka hasil yang akan didapat tidak akan maksimal bahkan dampak yang lebih besar kebijakan tidak bisa diterapkan maka dari kedua hal ini haruslah

⁶⁹Joan Nelson & Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara. Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).h. 59

seimbang, apabila antusias masyarakat tinggi namun pemerintah tidak melakukan sosialisasi maka implementasi tidak akan maksimal kemudian apabila pemerintah yang partisipatif namun masyarakat tidak partisipatif maka implementasi tidak akan maksimal maka dari itu harus semua komponen harus berpartisipasi agar perda kewenangan kampung dapat di implementasikan secara maksimal. Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya⁷⁰. Selaras dengan teori diatas perda kewenangan kampung sebagai produk kebijakan harus memiliki daya Tarik dan daya juga. Maksud daya Tarik disini adalah sebuah kebijakan harus sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat dan apabila sudah timbul rasa membutuhkan maka masyarakat akan merasa bahwa mereka sangat membutuhkan kebijakan dan ketika sudah merasa sangat butuh maka masyarakat akan merasa tertarik dan pada akhirnya masyarakat akan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian yang kedua memiliki daya jual, yang dimaksud daya jual disini adalah hal yang membuat merasa diuntungkan dengan adanya perda kewenangan kampung tersebut dan hal tersebut bisa dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan sebagai pembuat kebijakan.

⁷⁰ Mas Roro Lilik Ekowati, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Kebijakan atau Program*. (Surakarta: Pustaka Cakra, 2009).h .49

faktor tambahan yaitu faktor pengetahuan tentu dengan pengetahuan dan pendidikan tentu masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih mengerti walaupun tidak semuanya namun setidaknya mereka dapat menilai kebijakan yang akan diterapkan baik atau tidak dan masyarakat dapat lebih memaksimalkan pengimplementasian kebijakan yang dibuat karena memiliki pengetahuan yang cukup dengan kebijakan tersebut namun faktor pengetahuan juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintah seperti yang diungkapkan oleh bapak Biyanto selaku tim penyuluhan perwakilan dari kecamatan yang menyatakan bahwa ketika dilakukan sosialisasi banyak warga yang hanya datang namun tidak mengerti dan yang melatarbelakangi mereka sehingga tidak mengerti adalah faktor pendidikan, karena masyarakat di kecamatan Rebang Tangkas hanya 3 % memiliki pendidikan yang berskala S1 dan tentu saja selain melakukan sosialisasi tetapi juga harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan membuat mereka mengerti dan memahami perda dengan cara sosialisasi sesederhana mungkin dalam perbendaharaan kata yang digunakan⁷¹.

c) Usaha dan Solusi

⁷¹Wawancara dengan bapak Biyanto, 4 maret 2018 di balai kampung Air Ringkih

Menganalisa implementasi perda kewenangan kampung tidak relevan apabila hanya membahas kekurangan dari pemerintah dan masyarakatnya saja namun harus juga melihat upaya yang dilakukan pemerintah maupun upaya yang dilakukan oleh masyarakat. apabila hanya melihat dari sisi kurang dari perda kewenangan kampung maka dapat dipastikan yang timbul hanya perspektif dari sisi yang negatif maka dari itu harus juga melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna melihat dari sisi perspektif positif, sebagai penulis tidak bisa menyimpulkan hanya melihat dari sisi negatif. Maka dari itu pada pembahasan mengenai upaya kali ini penulis akan mengungkapkan apa saja upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat guna untuk menyelesaikan perda kewenangan dan melihat apa saja upaya yang sedang dilakukan maupun upaya yang sudah berhasil diterapkan kemudian dari masyarakat juga apa sudah mempunyai upaya untuk membantu pemerintah agar dapat menyelesaikan perda kewenangan kampung yang diteliti implementasinya di kecamatan Rebang Tangkas.

Pemerintah kabupaten Way Kanan telah mengesahkan perda kewenangan kampung sejak tahun 2016 yang lalu dan konsekuensi sudah siap dijalankan oleh pemerintah Way Kanan guna untuk menyelesaikan perda kewenangan kampung tersebut, dan konsekuensinya adalah harus membuat masyarakat yakin bahwa perda kewenangan kampung tersebut dapat membuat masyarakat lebih baik dan masyarakat merasa perda kewenangan kampung sangat dibutuhkan oleh masyarakat. dan dari konsekuensi tersebut maka akan lahir upaya yang dilakukan pemerintah dan

upaya yang dilakukan pemerintah menurut Mad Zendra selaku ketua tim sosialisasi di Kecamatan Rebang Tangkas ada beberapa cara yaitu sosialisasi, pendekatan personal dan konsolidasi⁷².

Sosialisasi merupakan langkah awal dan juga langkah umum yang dilakukan pemerintah dikabupaten Way Kanan dengan cara yaitu membentuk tim sosialisasi dari kecamatan dan tim sosialisasi ini bukan hanya berlaku untuk perda kewenangan kampung saja tetapi juga berlaku pada semua semua perda yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten Way Kanan. Saat ditemui dikampung Karya maju tim sosialisasi menyatakan bahwa saat pertama melakukan sosialisasi dikampung-kampung masih banyak masyarakat yang tidak hadir namun, sosialisasi sudah beberapa kali masyarakat yang hadir berangsur-angsur semakin bertambah walaupun tidak signifikan pertambahannya, dan sosialisasi juga terkadang terkendala oleh kondisi jalan yang suruh, maka dari itu terkadang jadwal sosialisasi sering mundur. Dan saat diwawancara tingkat keberhasilan seperti yang dinyatakan oleh Mad Zendra tingkat keberhasilan implementasi perda kewenangan kampung ini sudah mencapai kurang lebih 50 %⁷³. Jika tingkat implementasi perda kewenangan kampung masih mencapai 50 % dapat dikatakan masih belum maksimal karena menurut penulis suatu perda bisa dinyatakan berhasil apabila sudah mencapai 80 % sampai 90 %. Walaupun

⁷²Wawancara dengan bapak Mad Zendra, 23 maret 2018 di kantor kecamatan Rebang Tangkas

⁷³Wawancara dengan bapak Mad Zenra, 7 maret 2018 di balai kampung Tanjung Jaya

sosialisasi yang dilakukan belum maksimal namun upaya ini merupakan upaya yang baik dan jika dilakukan secara berkelanjutan maka guna sosialisasi akan maksimal.

Pendekatan personal merupakan upaya kedua yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan perda implementasi kewenangan kampung, upaya dengan pendekatan personal merupakan upaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kemasyarakat. Terjun langsung kemasyarakat disini maksudnya adalah dengan cara menyambangi rumah satu persatu dan tidak bersifat formal dan penyampaiannya hanya berbentuk percakapan sehari-hari dan tidak menggunakan bahasa resmi bahkan bisa menggunakan bahasa daerah dan upaya ini selain digunakan untuk masyarakat pada umumnya tetapi juga dilakukan pada orang tua yang tidak bisa menggunakan bahasa nasional dan hanya menguasai bahasa daerah tujuan untuk memngefisiensikan metode sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya karena dengan metode ini masyarakat akan lebih mengerti karena merasa memiliki kedekatan personal yang lebih apalagi menggunakan bahasa daerah berdasarkan kesukuan, berbeda dengan sosialisasi yang harus disediakan tempat dan harus bersifat resmi dan ditentukan waktunya, tetapi bukan berarti upaya ini tidak memiliki kesulitan saat dilakukan karena pada saat melakukan pendekatan personal ada masyarakat yang antusias namun ada juga masyarakat yang kurang antusias dan bahkan tanpa tahu apa yang ingin disampaikan oleh tim penyuluhan yang datang ada masyarakat yang langsung menolak terutama masyarakat yang masih berada dipedalaman. Namun pendekatan personal lebih efektif dibandingkan dengan

sosialisasi karena masyarakat yang sudah mengikuti sosialisasi dan juga mengikuti pendekatan personal mereka lebih mengerti ketika dijelaskan menggunakan upaya pendekatan personal.

Konsolidasi merupakan upaya ketiga yang dilakukan pemerintah guna untuk menyukseskan perda kewenangan kampung tersebut. dan konsolidasi yang dilakukan pada upaya ini ditujukan kepada kepala kampung yang ada disuatu kecamatan, kemudian setelah itu diberi materi kemudian tugas kepala kampunglah yang menyampaikan kepada masyarakat dengan kata lain konsolidasi ini menggunakan aparatur kampung sebagai tim sosialisasi, berbeda dengan sosialisasi yang menggunakan tim dari kecamatan yang harus terjun langsung pada masyarakat. dari sisi positifnya upaya ini akan membuat para kepala kampung dan jajaran akan lebih berat tugasnya karena harus berperan sebagai trainer dan harus memastikan bahwa perda kampung ini harus benar benar terimplementasi dengan sangat baik dan membuat tim sosialisasi dari kecamatan memiliki pekerjaan yang lebih ringan. dari sisi negatifnya akan membuat akan terjadi timpang tindih tanggung jawab antara pihak kampung dan pihak kecamatan dan yang kedua yaitu ditakutkan materi yang sesungguhnya harus disampaikan akan dirubah pada saat disampaikan oleh aparatur kampung karena penulis menemukan fakta bahwa materi dan point yang disampaikan kampung itu berbeda dan materi dan point lebih sedikit saat disampaikan oleh aparatur kampung, menurut penuturan salah satu warga dikampung

tanjung tiga. Yaitu Ibu Indah Suryani⁷⁴ dan hal ini juga yang terkadang membuat masyarakat tidak terlalu percaya dengan pemerintah kampung. Namun apabila kita melihat dari sisi pemerintah kampung maka mereka akan menyalahkan pemerintah kabupaten hal ini dinyatakan oleh salah satu kepala kampung dikecamatan Rebang Tangkas tepatnya dikampung Tanjung Jaya yaitu bapak Jhon yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten disaat melakukan konsolidas tidak mudah dimengerti dan penjelasanya berbelit-belit baik dari cara mengimplementasikan dan juga cara menyampaikan kepada masyarakat.

Masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan harus melakukan upaya, karena sebaik apapun kebijakan itu tetapi masyarakat tidak mendukung maka kebijakan itu akan gagal, maka dari itu masyarakat dituntut berperan aktif dalam menyukseskan perda kewenangan kampung yaitu dengan cara antusias, partisipatif dan bersedia melakukan apa yang diperintah kan aparatur kampung karena didalam perda kewenangan kampung terdapat point mengenai pelestarian adat-istiadat dan peraturan kampung yang membutuhkan andil besar dari masyarakat. maka dari itu masyarakat jangan pasif dan harus mau berkontribusi terhadap apa yang perda kewenangan kampung yang tujuannya adalah untuk membuat masyarakat sejahtera

Sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah memanglah harus menyejahterakan masyarakat, tetapi apabila kebijakan itu tidak maksimal pengimplementasiannya maka pemerintah harus siap untuk dikritik dan terkadang kritikan itu membangun ataupun

⁷⁴Wawancara dengan ibu Indah Suryani, 18 maret 2018 di toko Gimawan

kritik yang menjatuhkan namun sebagai peneliti selain siap mengkritik tetapi juga harus siap memberikan solusi maka dari itu pada pembahasan kali ini penulis akan memberikan solusi pada pengimplementasian perda kewenangan kampung yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk memaksimalkan perda kewenangan kampung.

Intensitas sosialisasi perda harus lebih banyak agar membuat masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan sosialisasi dan ketika antusias tinggi maka tingkat pemahaman yang ada pada masyarakat akan meningkat, dengan intensitas yang sering bertatap muka dengan masyarakat maka akan membuat aparat pemerintah lebih dikenal, disaat sudah dikenal maka masyarakat akan lebih mudah menerima apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan kata lain yaitu menjalin keakraban. Ketika keakraban itu sudah terjalin maka perhagaan yang besar dari masyarakat tentu akan diperoleh untuk pemerintah dan dengan intensitas yang sering bertatap muka dengan masyarakat akan memudahkan aparat pemerintah untuk mengetahui point-point apa saja yang terdapat dalam perda kewenangan kampung yang sudah diterapkan dapat melihat sudah seberhasilkah atau belum dan itu dapat dilakukan dengan mudah apabila antara masyarakat dekat dengan pemerintahnya. Maka dari itu melihat penjelasan diatas penulis meyakinkan pemerintah bahwa intensitas sosialisasi dan intensitas bertemu masyarakat dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan perda kewenangan kampung untuk kedepannya.

Pemateri sebagai solusi kedua agar dapat membuat perda kewenangan kampung ini berjalan dengan maksimal, penulis berpendapat demikian karena ada pengakuan dari beberapa warga yang menyatakan bahwa pematerinya membosankan maka dari itu pilihlah pemateri dari tim sosialisasi itu yang pinter ngomong atau seperti yang sudah dikatakan diatas harus memiliki daya jual dan daya Tarik agar masyarakat antusias saat mengikuti sosialisasi yang dijalankan. Pemateri memang menjadi faktor yang harus diutamakan karena pemateri adalah penyampai yang bertugas menerangkan apa pentingnya perda kewenangan kamlung bagi masyarakat dan kalau pemateri tidak jelas menerangkan isi dari perda kewenangan kampung maka ini akan menjadi masalah yang fatal baik dari sisi penerapan perda dan juga komunikasi antara masyarakat dan pemerintahnya, maka dari itu penulis yakin dengan pemateri yang baik akan membuat perda yang diterapkan akan maksimal.

Membentuk pengawasan yang mengawasi sejauhmana dan bagaimana implementasi perda perda kewenangan kampung sudah diterapkan menjadi kunci keberhasilan perda ini solusi ini akan membentuk pertahan untuk perda kewenangan kampung agar tidak terjadi kecurangan, perda kewenangan kampung merupakan perda yang kompleks dimana menyangkut dana yang besar dan apabila tidak diawasi dan memiliki tim pengawas yang jelas maka akan terjadi banyak sekali penyimpangan dan dari tim pegawai ini juga dapat membuat program laporan jadi apapun yang terkait dengan perda kewenangan untuk sekarang ini memang sudah ada tim yang mengawasi namun penulis menganjurkan untuk membentuk tim khusus

yang diperuntukan untuk mengawasi perda kewenangan kampung agar pengawasan hanya terkonsentrasi pada satu obyek pengawasan juga dan akan membuat tim lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap perda kewenangan kampung. Maka dari penulis yakin fungsi pengawasan dan pembentukan tim pengawasan akan membuat kebijakan yang diterapkan dalam hal ini yaitu perda kewenangan kampung akan maksimal dan meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Meningkatkan transparansi menjadi solusi keempat agar perda kewenangan kampung ini berjalan dengan baik. Transparansi dalam sebuah kebijakan itu adalah sebuah keharusan yang tidak bisa disanggah lagi karena peran transparansi sangat lah fleksibel yang dapat menjadi penghambat, pendorong dan solusi, transparansi dari pemerintah memang sangat dibutuhkan karena apabila tidak transparansi maka kebijakan yang diterapkan akan gagal dan transparansi ini selaras dengan solusi diatas mengenai pengawasan kalau tidak transparan maka tim pengawas yang akan menindaklanjuti, maka dari itu transparansi adalah hal yang sangat penting sebagai solusi meningkatkan perda kewenangan kampung agar implementasinya maksimal.

Aparatur kampung menjadi solusi kelima untuk menyelesaikan perda kewenangan kampung ini karena pemegang kekuasaan penuh penerapan, kekuasaan penuh yang dimaksud karena aparatur kampung adalah aktor utama penerapan perda kewenangan kampung, hal ini cukup beralasan karena kampunglah yang memegang kendali mulai dari dana, program dan aturan yang terdapat didalam perda

kewenangan kampung berada pada kampung maka dari itu harus menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ini menyampaikan keluhan dan ide seperti infrastruktur mana yang akan didahulukan, apa adat yang akan dipertahan dan peraturan kampung apa saja yang akan dipertahankan dan kampung harus memiliki andil besar dan proses tersebut, selain itu masyarakat sebagai objek kebijakan harus antusias agar perda yang diterapkan itu terasa manfaat dan harus bekerja sama dengan kampung dalam skala besar kampung yang ada dikecamatan Rebang Tangkas harus bekerja sama demi suksesnya perda kewenangan kampung tersebut.

d) Hasil implentasi perda kewenangan kampung

Mengimplementasikan perda kewenangan kampung memang bukan sesuatu yang mudah, banyak hambatan dan rintangan yang menjadi kosekuensi dari perda kewenangan kampung, perda kewenangan kampung merupakan perda cukup kompleks memiliki pungsi dan bahkan berkaitan dengan perda lainnya, perda kewenangan kampung merupakan perda yang melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, dan sampai kepada masyarakatnya. Perda kewenangan kampung merupakan perda yang menuntut semua komponen harus terlibat perda kewenangan kampung merupakan perda yang cukup riskan apabila disalah gunakan karena dalam perda ini ada point yang menyangkut dana atau finansial, setiap daerah agar berjalan pembangunannya, pelestarian budayanya pemeliharaan infastrukturnya itu semua harus menggunakan dan anggara dana yang tidak sedikit dan perda kewenangan kampung memasukan

pengelolaan dana kampung diharapkan dengan adanya anggaran khusus untuk kampung dapat memajukan segala hal positif terhadap kampung tersebut, dana merupakan kunci dari setiap kebijakan yang dibuat maka jika ingin memaksimalkan perda kewenangan kampung maka pemerintah harus siap menggelontorkan dana yang cukup banyak hal ini cukup beralasan perda kewenangan kampung merupakan perda yang cukup pada isinya dan setiap point membutuhkan dana yang tidak sedikit semua point tersebut memaksa pemerintah menjadi fasilitator dan menuntut pemerintah agar terjun langsung penyedia seperti pelestarian adat istiadat menuntut pemerintah menyediakan tempat dan alat yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut, tetapi jika pemerintah sudah melaksanakan tugasnya pemerintah juga dapat menuntut kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat, tentu ini bukan hal yang mudah. Karena di zaman modern sekarang banyak anak muda yang enggan melestarikan adat-istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dan itu merupakan hasil dampak dari arus globalisasi yang begitu kuat melanda anak muda di zaman sekarang ini, karena tanpa sadar mereka akan kehilangan identitas mereka sebagai orang Indonesia yang termasyhur keseluruh dunia bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kebudayaan terbanyak dan orang asing yang datang ke Indonesia karena kagum dengan budaya Indonesia namun anehnya kita sebagai generasi muda Indonesia enggan melestarikan budaya yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, di daerah Lampung pun demikian kebudayaan itu bukan sesuatu yang penting dan bukan suatu prioritas maka dari itu adanya perda

kewenangan kampung diharapkan mencegah arus globalisasi yang dapat mengikis dan menghilangkan kebudayaan yang ada di Indonesia terutama budaya Lampung. Maka dari itu peran pemerintah penting namun yang lebih penting peran dari masyarakat karena apabila semua fasilitas sudah disediakan tetapi pelestarian adat-istiadat gagal dilakukan maka ada dua faktor yang dirugikan yang pertama dana yang sudah digunakan dan kedua kebijakan yang dibuat pemerintah termasuk kategori kebijakan yang gagal maka dari itu masyarakat harus memiliki usaha dan semangat lebih memang terkadang melestarikan budaya itu memang sulit karena generasi sekarang lebih menyenangi budaya asing dari pada budaya sendiri berdasarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya yang telah menyatakan bahwa ada dusun-dusun di kampung-kampung yang berada di kecamatan Rebang Tangkas telah memulai pelestarian budaya dan adat-istiadat tetapi banyak juga dusun-dusun di kampung-kampung yang berada di kecamatan Rebang Tangkas yang belum memulai pelestarian adat-istiadat dapat dikatakan pengimplementasian perda kewenangan kampung pada tidak merata dan dinyatakan belum berhasil sepenuhnya terimplementasi dengan baik akan tetapi perda kewenangan kampung masih terus diupayakan agar pengimplementasiannya maksimal.

Perda kewenangan kampung juga memuat tentang pemeliharaan infrastruktur yang bertujuan untuk menjaga infrastruktur agar tetap terjaga dan tidak rusak dan pada perda kewenangan kampung infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan, balai kampung, puskesmas, dan infrastruktur lainnya dan tentu memerlukan dana yang

cukup banyak dengan kondisi geografi pegunungan maka tentu akan membuat pemeliharaan infrastruktur terutama jalan akan menambah biaya pemeliharaan infrastruktur kerana dengan kondisi pegunungan tentu memiliki banyak lembah yang membuat banya tanjakan dan turunan yang membuat kontur tanah tidak stabil dan membuat rawan longsong serta kekuatan dari infrastruktur jalan berkurang, Belum lagi ditambah kapasitas muatan pada mobil truk diwilayah tersebut melebihi batas maka tidak jarang kerusakan jalan disebabkan oleh kualitas jalan yang buruk serta muatan berlebih dari mobil truk. Dan untuk sekarang ini memang sudah dibangun jalan dengan kualitas baik namun belum merata hanya dibeberapa titik dari sekian banyak jalan yang kurang memadai maka dari itu masih banyak keluhan yang disampaikan oleh warga mengenai jalan yang rusak. Ditambah denga jumlah bangunan kampung yang banyak belum dibenahi namun sudah ada beberapa yang dibenahi seperti dikampung Beringin Jaya, Tanjung Tiga dan Lebak Peniangan merujuk pada pernjelasan diatas dan juga pada penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dibidang pemeliharaan infrastruktur masih banyak yang harus dibenahi namun sudah ada hasil yang tampak dari perda kewenangan kampung walaupun baru sekitar kurang lebih 30 % infrastruktur yang dibenahi.

Perda kewenangan kampung juga memuat tentang peraturan kampung jadi dalam hal Ini peraturan kampung yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh kampung tersebut dan hanya berlaku pada kampung itu saja, kampung dalam hal ini memiliki kewenangan penuh tetapi walaupun memiliki kewenangan pepenuh

kampung harus melaporkan kepada pemerintah kecamatan terkait peraturan yang dibuat hal ini dilakukan agar tidak ada peraturan yang merugikan masyarakat dan juga peraturan yang merugikan pemerintah, maka dari itu setiap membuat peraturan di kampung ada perundingan yang dilakukan kedua belah pihak dan tentu peraturan yang dibuat harus menguntungkan kedua belah pihak namun tidak jarang peraturan diterapkan tanpa adanya perundingan terlebih dahulu seperti adanya iuran kampung yang ada di kampung Lebak Peniangan yang terkadang penarikannya tidak ada pemberitahuan sebelum dan peraturan ini sudah berjalan maka dari itu banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini maka dari itu merujuk dari penjelasan diatas dan penjelasan sebelumnya maka penulis menyatakan bahwa pengimplementasian perda kewenangan kampung mengenai peraturan desa belum berhasil sepenuhnya namun perbaikan masih akan terus dilakukan.

Perda kewenangan kampung juga memuat tentang kewenangan penuh bagi kampung kewenangan penuh yang dimaksud disini merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah kampung, hal ini dilakukan oleh kabupaten karena pemerintah kabupaten berpendapat bahwa jajaran pemerintahan yang lebih tahu mengenai keluhan dan kebutuhan masyarakat adalah pemerintah kampung, maka dari pemerintah kampung diberi kewenangan secara penuh, akan tetapi itu tidak sepenuhnya diberikan secara absolute atau mutlak tetapi pemerintah kabupaten masih berperan sebagai pengawas dan pengah antara masyarakat dan pemerintah kampung karena apabila ada kebijakan yang tidak sesuai

yang dibuat pemerintah kampung terhadap rakyatnya maka pemerintah kabupaten akan menerima keluhan dari masyarakat, merujuk pada penjelasan diatas dan penjelasan pada faktor komunikasi maka penulis mendapati masih banyak peraturan kampung yang bermasalah seperti pada penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa ada kampung yang menyalahgunakan wewenang dalam bentuk membuat kebijakan dan langsung diterapkan dan kebijakan itu ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat dan memberatkan masyarakat. dan temuan kedua yang didapati pada desa Madang Jaya, pemerintah pada kampung ini tidak pernah berkomunikasi kepada masyarakat namun yang menjadi hal yang cukup mencengangkan adalah dari hasil survey yang penulis himpun kampung ini merupakan desa paling berhasil dalam menerapkan perda kewenangan kampung. Dan dapat disimpulkan bahwa pengimplentasian perda tentang kewenangan penuh yang diperoleh kampung belum berhasil akan tetapi semakin tampak hasilnya walaupun belum banyak.

Perda kewenangan kampung merupakan perda yang sangat mewakili kepentingan masyarakat di beberapa aspek yang ada di masyarakat dan berawal dari isi perda tersebut sehingga yang sangat menarik untuk diteliti dan ketika melakukan prasurvey penelitian ternyata banyak keluhan dari warga mengenai perda kewenangan dan maka dari itu perda kewenangan kampung ini menjadi judul prioritas untuk penulis tetapi bukan hal yang mudah untuk meneliti sebuah perda yang isinya sangat kompleks dibutuhkan waktu dan data tidak sedikit dan juga banyak kendala yang dihadapi namun semua itu sepadan dengan hasil yang didapat dari

penelitian mengenai perda kewenangan kampung tersebut. diatas telah dijelaskan bagaimana hambatan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat untuk mengimplentasikan perda kewenangan kamping tersebut dan faktor yang bisa membuat perda kewenangan kampung ini berhasil juga telah dijelaskan kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan perda kewenangan kampung tersebut serta penulis memberikan solusi agar perda ini dapat dimaksimalkan dan yang terakhir penulis menganalisa dengan berbagai pernjelasan sebelumnya mengenai isi dan tingkat keberhasilan perda kewenangan kampung tersebut satu persatu dan penulis menarik kesimpulan berdasar penjelasan data kemudian dipadukan dengan wawancara dengan masyarakat dan juga wawancara dengan aparatur kampung serta menggunakan teori yang ada baik dengan menggunakan teori implementasi dan juga teori pengenai perda maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi perda kewenangan kampung yang diterapkan dikabupaten Way Kanan dan khususnya dikecamatan Rebang Tangkas dinyatakan belum berhasil secara keseluruhan merujuk pada penjelasan-penjelasan sebelumnya yang membuat perda ini tidak berhasil secara keseluruhan adalah yang pertama dari sisi masyarakat dibeberapa kampung tingkat kepedulian terhadap perda yang dibuat pemerintah masih kurang, kemudian di beberapa kampung juga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih kurang serta minimnya partisipasi dari masyarakat dibeberapa kampung terutama masyarakat yang berada dipedalaman. Yang kedua dari sisi pemerintah belum maksimalnya sosialisasi yang disebabkan oleh kondisi

infrastruktur yang belum baik dan kondisi geografis yang meliputi pegunungan menambah hambatan yang menyebabkan sosialisasi yang dilakukan belum maksimal kemudian tingkat transparansi dari pemerintah masih dinilai sangat kurang di beberapa desa terutama di desa lebak peniangan.

Penelitian ini memang menyatakan bahwa perda kewenangan kampung yang diterapkan belum berhasil, akan tetapi bukan sepenuhnya tidak berhasil karena di dusun-dusun yang ada di kampung-kampung yang berada di kecamatan Rebang Tangkas sudah ada yang berhasil bahkan semua isi dari perda kewenangan kampung telah diterapkan. pernyataan tidak berhasil ini bukan valid dan tidak bisa diganggu gugat dan dengan pembahasan yang sama dan dengan peneliti yang berbeda bisa jadi hasil yang akan ditimbulkan berbeda, kemudian penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan saja yaitu kecamatan Rebang Tangkas dan dinyatakan tidak berhasil akan tetapi hasilnya pun akan berbeda dilakukan di kecamatan lain yang berada di kabupaten Way Kanan karena di setiap kecamatan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dan pemerintahan dengan tingkat keefisien dalam memerintah yang berbeda serta tingkat kemajuan yang berbeda maka akan menimbulkan hasil yang berbeda. Dan juga tingkat ekonomi dan tingkat kepedulian yang berbeda pada masyarakat juga akan menimbulkan hasil yang berbeda. Hal ini penulis ungkapkan karena wilayah kabupaten Way Kanan sangat luas dan terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi :

- 1) Kecamatan Bahuga
- 2) Kecamatan Banjit
- 3) Kecamatan Baradatu
- 4) Kecamatan Blambangan Umpu
- 5) Kecamatan Buay Bahuga
- 6) Kecamatan Bumi Agung
- 7) Kecamatan Gunung Kabuhan
- 8) Kecamatan Kasui
- 9) Kecamatan Negara Batin
- 10) Kecamatan Negeri Agung
- 11) Kecamatan Negeri Besar
- 12) Kecamatan Pakuan Ratu
- 13) Kecamatan Rebang Tangkas
- 14) Kecamatan Way Tuba

Seperti yang sudah dijelaskan diatas banyak sekali faktor yang membedakan dari setiap kecamatan-kecamatan yang ada kabupaten Way Kanan. Maka dari itu apabila ada yang membantah penelitian ini, itu sangat wajar namun yang perlu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini juga memiliki data referensi yang jelas dan siap dipertahankan argumennya. Dan disini lain mungkin dari objek yang diteliti mungkin juga bisa berbeda karena tingkat implementasi perda satu dan lainnya juga berbeda, kemudian yang dapat membuat berbeda adalah dari sisi wilayah, walaupun

tempat penelitian masih diwilayah Way Kanan namun dengan kecamatan yang berbeda memiliki tentu hasilnya akan berbedakerena kecamatan yang ada dikabupaten Way Kanan memiliki keunggulan yang berberbeda contohnya seperti kecamatan Baradatu sebagai sentral perdagangan, kecamatan Blambangan Umpu sebagai sentral pemerintahan dan kecamatan Rebang Tangkas sebagai sentral pertanian dan peternakann. dan selanjutnya dari sisi metode yang digunakan tentu ini juga akan berpengaruh pada hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Rebang Tangkas dengan objek yaitu perda kewenangan kampung, berdasarkan penelitian implementasi perda kewenangan kampung di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Perda kewenangan kampung belum berhasil secara keseluruhan merujuk pada penjelasan-penjelasan sebelumnya yang membuat perda ini tidak berhasil secara keseluruhan adalah yang pertama dari sisi masyarakat di beberapa kampung tingkat kepedulian terhadap perda yang dibuat pemerintah masih kurang, kemudian di beberapa kampung juga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih kurang serta minimnya partisipasi dari masyarakat di beberapa kampung terutama masyarakat yang berada di pedalaman. Yang kedua dari sisi pemerintah belum maksimalnya sosialisasi yang disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang belum baik dan kondisi geografis yang meliputi pegunungan menambah hambatan yang menyebabkan sosialisasi yang dilakukan belum maksimal kemudian tingkat transparansi dari pemerintah masih dinilai sangat kurang di beberapa desa terutama di desa Lebak Peniangan.

Penelitian ini menunjukkan adanya progres kedepanya yang ditandai dengan adanya faktor pendorong yang dapat menyusutkan perda ini yaitu komunikasi, transparansi, dan tingkat kepedulian serta pengetahuan tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Way Kanan pada masyarakat khususnya di Kecamatan Rebang Tangkas.

Merujuk pada kesimpulan-kesimpulan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi perda kewenangan kampung belum berhasil diterapkan secara keseluruhan namun sebagai peneliti bukan hanya mengkritik tetapi juga menawarkan upaya dan solusi untuk memaksimalkan implementasi perda kewenangan kampung yaitu upaya sosialisasi, pendekatan personal, dan konsolidasi dan peran partisipasi dari masyarakat dan menawarkan solusi dengan cara Meningkatkan intensitas sosialisasi, mencari pemateri terbaik, membentuk tim pengawasan, meningkatkan transparansi dan masyarakat dan aparatur pemerintahan harus berkontribusi dan bekerjasama dengan solid.

B. Saran-saran

Guna meningkat kan implementasi perda kewenangan kampung di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

3. Pemerintah harus lebih banyak melakukan kegiatan dan sosialisasi guna untuk meningkat tingkat pemahaman mengenai kebijakan yang diterapkan. Karan

masyarakat tidak akan pernah memahami peraturan kalau pemerintahnya tidak berperan peran aktif

4. Masyarakat harus lebih peduli dengan apa yang dilakukan pemerintah baik tentang perda mau pun berpub karena dengan masyarakat yang memiliki peran aktif akan membuat perda terealisasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- An-Nabhani. 2003. *Taqiyyuddin, Peraturan Hidup Dalam Islam*. Bogor : Psutaka Thariqul Izzah.
- Bintarto, R dan Hadi Sumarno Surastopo. 1986. *Metode Analisa Geografi*. LP3SES : Jakarta.
- Budiman, Rusli. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.
- Dunn, William N. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Ke III .Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dwidjowijoto,Raint Nugroho. 2009.*Kebijakan Public Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Alex Media Kompitindo.
- Edwards III. George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton: Cogressional Quaerterly Inc.
- Farhan, Dkk. 2007. *Memfasilitasi Konsultasi Public Dan Refleksi Pengalaman Penyusunan, Rancangan, Peraturan Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,Dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan Daerah*. (RPP-T2CP2EPRD). Jakarta : Usaid.
- Farida, SoepraptoIndrati Maria. 2007. *Ilmu Perundangan-Undangan*. Yogyakarta : Kanisius.

- Halim, Hamzah Dan Redindo Kemal Syahrul. 2009. *Cara Praktis Membuat Dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,
- Hasan,M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrati, Maria Farida S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan* Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius
- Inu, kencana Syafiie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.PT Refika Aditama: Bandung.
- Irfan, MP Islamy. 2009. *rinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- J.H Hartono. 2004. *Matodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bpfe.
- Kartono,Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Stia Lan Press..
- M. Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Manan,Bagir. 1995. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Lppm Universitas Bandung.

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI.
- Mertokusumo,Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Mulyana,Dedy. 2008.*Ilmu Komunikasi Pengantar*.Bandung : Remaja Rosadakarya
- Nugroho, D Riant. 2004. *„Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputendo.
- . 2008.*Kebijakan Public Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Alex Media Kompertindo.
- Nurcholis,Hanif. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Rahmat, Jalaludin. 2004.*Psikologi Komunikasi*Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999
- Putra, KurniaMahendra. 2007. Dkk *„Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Saptono. 2006. *Sosiologi Politik*. Semarang : Phibeta Aneka Gama.
- Sf. Marbun Dan Moh. 2006. Mahfud Md. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jogjakarta: Liberty.
- Solichin, Abdul Wahab.2008. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudikno, Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Syaukani, Dkk.. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, Cet III

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit

UNPAD.

Tjandra, Riawan Dan Budi Darsono Kresno. 2009. *Legistatif Drafting Teori Dan*

Tehnik Pembuatan Peraturan Daerah. Yogyakarta : Uajy.

Tuwu, Alimuddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Ui Press

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke*

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lampera

Pustaka Utama.

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Pasal 1 Ayat 7.

Uu No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1. Tentang Kewenangan Kampung.

Undang-Undang Dasar Tentang Hak Dan Kewenangan Kampung Pasal 19 Dan 103

Sumber Lain :

Arsip Data Kecamatan Rebang Tangkas Tahun 2002

Data Kecamatan Rebang Tangkas Tahun 2017

Dokumen Tim Penyuluhan Rebang Tangkas Tahun 2018 Dikantor Kecamatan

Rebang Tangkas

LAMPIRAN

A) Daftar Informan.

- 1) Nama :
- 2) Jabatan :
- 3) Pertanyaan :
- 4) Pendapat :

No	Nama	Jabatan	Pertanyaan	Pendapat
1	Darsan	Masyarakat	Apakah mengetahui tentang adanya perda kewenangan kampung ?	kalau orang seperti kami ini tidak akan mengetahui tentang kebijakan dari pemerintah karena kami tidak ada waktu untuk mengetahui peraturan kami ini petani jadi waktu kami habis untuk di ladang dan perhatian pemerintah pada kami pun masih dirasa sangat kurang.
2	Tri Wanto	Kepala kampung	Sudah sejauh mana mengimplimentasikan perda kewenangan kampung yang dilakukan ?	Yang masih menjadi kendala di kampung saya adalah tingkat kepercayaan masyarakat masih sangat kurang dan imbasnya perdanya agak tersendat pengimplimentasiannya.
3	Mulyadi	Kepala	Bagaimana antusiasme warga	Masyarakat di kampung ini kurang

		kampung	terhadap perda kewenangan kampung ?	proaktif dengan perda yang diterapkan.
4	Jono	Masyarakat	Mengapa masyarakat tidak proaktif terhadap kebijakan yang ingin diterapkan ?	Diwilayah ini masyarakatnya banyak yang keladang dan pulangnye sore jadi mereka jarang ada yang tau mengenai perda ini. Saya pribadi tahu tapi tidak tahu kalau yang lain
5	Taman	Tim penyuluhan kecamatan	Apa saja kendala yang dihadapi dengan kondisi geografi di kecamatan rebang tangkas ?	Tantangan kami kondisi jalan dan struktur jalan masih banyak yang rusak dan banyak tanjakan dan turunan ditambah kalo hujan jalanya licin karena masih tanah.
6	Samsi	masyarakat	kalian mengetahui perda kewenangan kampung ?	Gimana mau tahu tentang perda kami saja tidak sekolah soalnya sekolahnya jauh lewat lembah terus naik apalagi kalo musim hujan tidak bisa nyebrang sungai.
7	Eko	Guru	Mengapa warga disini jarang mengikuti sosialisasi	Kami sebenarnya mau ikut sosialisasi tapi kondisi jalan yang

			?	rusak parah itu kendalanya yang dekat jadi jauh.
8	Tukiman Ngalimun	Tokoh masyarakat dan calon DPRD kabupaten	Sebagai tokoh masyarakat apa bapak mengetahui keluhan warga mengenai infrastruktur ?	Ya saya mengetahui hal tersebut dan yang perlu digaris bawahi ada pembangunan sudah berjalan tetapi memang belum merata contohnya seperti jembatan di kampung karya maju.
9	Fatur Rohman	PNS	Bagaimana transparansi yang diterapkan didalam pengimplementasian perda kewangan kampung ?	Masih sangat kurang karena masih banyak yang terkesan ditutup-tutupi apa lagi kalau soal dana
10	Rindi Setiowati	Pengawai bidang pelayan polsek Rebang Tangkas	Bagaimana transparansi yang diterapkan didalam pengimplementasian perda kewangan kampung ?	Saya yang mengikuti langsung proses sosialisasi memperhatikan bahwa ketika soal dana maka aparaturnya tidak menjelaskan secara keseluruhan dan juga masyarakat pedalam itu malah tidak tahu sama sekali
11	Sukma Wati	Kepala sekolah TK	Bagaimana komunikasi yang dilakukan pemerintah	Saya mengetahui perda itu, karena saya mengikuti sosialisasinya tetapi

		almanar	mengenai penerapan perda kewenangan kampung ?	yang membuat saya kecewa adalah semuanya tidak sesuai harapan contoh jalan saja tidak sesuai janji bangunan belumbanyak yang berjalan.
12	Ali Wiyono	Sekertaris desa	Mengapa ada keluhan dari masyarakat mengenai perda kewenangan kampung ?	Kami sudah berusaha menerapkan perda kewenangan kampung ini secara merata akan tetapi kami harus memperhatikan apa yang lebih apa yang masyarakat butuhkan maka dari kami dahulukan apabila itu memang sangat dibutuhkan.
13	Hery	Pegawai kecamatan	Bagaimana menurut anda komunikasi yang sudah terjalin antara pemerintah dan masyarakat ?	Menurut saya kurang baik apalagi terhadap masyarakat pedalam seharusnya mereka itu lebih diperhatikan.
14	Naknung	Wiraswasta	Bagaimana menurut anda penerapan perda kewenangan kampung di kampung anda ?	Alhamdullilah sudah cukup memuaskan mas bahkan belum lama dari waktu sosialisasi yang sudah banyak pembangunan yang berjalan

15	H.Sadarman	Wiraswasta	Bagaimana menurut anda penerapan perda kewenangan kampung di kampung anda ?	Saya pribadi merasa cukup puas dan pemerintah disini selalu menerangkan dana yang ada digunakan untuk apasaja dan dikampung kami semua dusun menerapkan hal itu.
16	Elmi	Wiraswasta	Apa yang menjadi hambatan untuk menerapkan perda kewenangan kampung ?	Sebenarnya bukan hal yang sulit untuk menerapkan perda kewenangan kampung tetapi yang jadi hambatan itu komunikasi dan transparansi masih sangat kurang dari pemerintah dan ditambah masyarakat kurang partisipatif.
17	biyanto	Tim penyuluhan	Apa yang menjadi hambatan untuk melakukan sosialisasi perda kewenangan kampung ?	Banyak ! tetapi banyak masyarakat yang datang cum diam dan ditanya, ketika sosialisasi sudah berakhir mereka tidak mengerti karena pendidikan mereka yang rendah dan membuat daya tangkap mereka rendah.

18	Mad Zendra	Ketua tim penyuluhan	Apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan penerapan perda kewenangan kampung ?	Kami sudah berupaya dan kami memiliki beberapa upaya yaitu sosialisasi secara umum, pendekatan personal dan konsolidasi dengan pemerintah kampung dan tingkat keberhasilan sudah mencapai 50%
19	Indah Suryani	Guru	Bagaimana tanggapan anda setelah mengikuti sosialisasi mengenai perda kewenangan kampung ?	Berbeda, materi yang disampaikan dari tim kecamatan lebih lengkap dari pada tim kampung.
20	Jhon	Kepala kampung	Bagaimana konsolidasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah kabupaten ?	Susah dimengerti dan berbeli-belit

B) Tabel wilayah administrasi

No	Nama Kampung	Luas Wilayah	Jumlah		Jumlah penduduk			Jumlah Jiwa	Keterangan Nama Kepala Kampung
			Dusun	RT	KK	LK	PR		
1	Air Ringkih	12630 Km ²	10	17	820	1531	1370	2901	Mutholib
2	Beringin Jaya	11000 Km ²	4	8	451	797	820	1617	Nurman Hadi
3	Gunung Sari	10500 Km ²	6	11	642	1278	1006	2284	Wanasahir
4	Lebak Peniangan	40000 Km ²	9	25	1276	1625	1750	3375	Triwanto
5	Madang Jaya	10000 Km ²	5	8	424	748	777	1525	Mirhanudin
6	Simpang Tiga	30000 Km ²	7	12	739	2080	2132	4212	Hendra
7	Tanjung Jaya	15120 Km ²	6	13	404	801	753	1554	Bahrudin
8	Tanjung Tiga	30000 Km ²	8	15	797	1398	1338	2736	Sukiman
9	Karya Maju	12520 Km ²	5	7	292	488	447	935	Thomas Alpa Edison
10	Mulya Jaya	13330 Km ²	7	14	557	938	876	1814	Jonhendri
	Jumlah	185100 Km ²	67	130	5827	11894	13083	24977	

C) Dokumentasi



LAMPIRAN

A) Daftar Informan.

- 1) Nama :
- 2) Jabatan :
- 3) Pertanyaan :
- 4) Pendapat :

No	Nama	Jabatan	Pertanyaan	Pendapat
1	Dar san	Masyarakat	Apakah mengetahui tentang adanya perda kewenangan kampung ?	kalau orang seperti kami ini tidak akan mengetahui tentang kebijakan dari pemerintah karena kami tidak ada waktu untuk mengetahui peraturan kami ini petani jadi waktu kami habis untuk di ladang dan perhatian pemerintah pada kami pun masih dirasa sangat kurang .
2	Tri Wanto	Kepala kampung	Sudah sejauh mana implementasi perda kewenangan kampung yang dilakukan ?	Yang masih menjadi kendala di kampung saya adalah tingkat kepercayaan masyarakat masih sangat kurang dan imbasnya adanya agaknya sendat pengimplentasian nya.
3	Mulyadi	Kepala kampung	Bagaimana antusias masyarakat terhadap perda kewenangan kampung ?	Masyarakat di kampung ini kurang proaktif dengan perda yang diterapkan.
4	Jon o	Masyarakat	Mengapa masyarakat tidak proaktif terhadap kebijakan yang di inditerapkan ?	Di wilayah ini masyarakatnya banyak yang keladang dan pulang nya sore jadi mereka jarang ada yang tau mengenai perda ini. Saya pribadi tahu tapi tidak tahu kalau yang lain
5	Taman	Tim penyuluhan kecamatan	Apasaja kendala yang di hadapi dengan kondisi geografi di	Tantangan kami kondisi jalan dan struktur jalan masih banyak yang rusak dan banyak tanjak dan turuna

		n	kecamatanrebangtan gkas ?	nditambahkalohujanjalanyalicinkar enamasihtanah.
6	Sa msi	masyaraka t	kalianmengetahuiper dakewenangankampu ng ?	Gimanamautahutentangperda kami sajatidaksekolahsoalnyasekolahny ajauglewatlembahterusnaikapalagi kalomusimhujatidakbisanyebrangs ungai.
7	Eko	Guru	Mengapawargadisini jarangmengikutisosi alisasi ?	Kami sebenarnyamauiikutisosisatisapik ondisijalan yang rusakparahitukendalanya yang dekatjadijauh.
8	Tuk ima nNg ali mu n	Tokohmas yarakatda ncalon DPRD kabupaten	Sebagaitokohmasyar akatapabapakmenet ahuikeluhanwargam engenaiinfrastruktur ?	Yasayamengetahuialtersebutdany ang perludigarisbawahiadapembangun ansudahberjalantetapimemangbelu mmeratacontohnyasepertijembatan di kampungkaryamaju.
9	Fat urR oh man	PNS	Bagaimanatranspara nsi yang diterapkandidalampe ngimplementasianpe rdakewangankampu ng ?	Masihsangatkurangkarenamasihba nyak yang terkesanditutup- tutupiapaalagikalausaldana
10	Rin diS etio wati	Pengawai bidangpel ayanpolse kRebangT angkas	Bagaimanatranspara nsi yang diterapkandidalampe ngimplementasianpe rdakewangankampu ng ?	Saya yang mengikutilangsung proses sosialisasimemperhatikanbahwaket ikasoaldanamakaaparaturtidakmen jelaskansecarakeseluruhandanjuga masyakatpedalamitumalahtidaktah usamasekali
11	Suk ma Wat	Kepalasek olah TK almanar	Bagaimanakomunik asi yang dilakukanpemerintah mengenaipenerapan	Sayamengetahuiperdaitu, karenasayamengikutisosisiasinya tetapi yang membuatsayakecewaadalahsemua

	i		perda kewenangan kampung ?	nyata tidak sesuai harapan contoh jalan aspal tidak sesuai janji pembangunan belum banyak yang berjalan.
1 2	Ali Wiyono	Sekretaris desa	Mengapa ada keluhan dari masyarakat mengenai perda kewenangan kampung ?	Kami sudah berusaha menerapkan perda kewenangan kampung ini secara merata akan tetapi kami harus memperhatikan apa yang lebih penting yang masyarakat butuhkan maka dari kami dahulukan apabila itu memang sangat dibutuhkan.
1 3	Herly	Pegawai kecamatan	Bagaimana menurut anda komunikasi yang sudah terjalin antara pemerintah dan masyarakat ?	Menurut saya kurang baik apalagi terhadap masyarakat pedesaan seharusnya mereka itu lebih diperhatikan.
1 4	Naknang	Wiraswasta	Bagaimana menurut anda penerapan perda kewenangan kampung di kampung anda ?	Alhamdulillah sudah cukup memuaskan mas bahkan belum lama dari waktu sosialisasi yang sudah banyak pembangunan yang berjalan
1 5	H.S adarman	Wiraswasta	Bagaimana menurut anda penerapan perda kewenangan kampung di kampung anda ?	Saya pribadi merasa cukup puas dan pemerintah disini selalu menerangkan dana yang ada digunakan untuk apa saja di kampung kami semua sudah menerapkan hal itu.
1 6	Elmi	Wiraswasta	Apa yang menjadi hambatan untuk menerapkan perda kewenangan kampung ?	Sebenarnya bukan hal yang sulit untuk menerapkan perda kewenangan kampung tetapi yang jadi hambatan itu komunikasi dan transparansi masih sangat kurang dari pemerintah dan ditambah masyarakat kurang partisipatif.

17	biyanto	Tim penyuluhan	Apa yang menjadi hambatan untuk melakukan sosialisasi perdakewenangan kampung ?	Banyak !tetapi banyak masyarakat yang datang cum diamdanditanya, ketika sosialisasi sudah berakhir mereka yang rendah dan membuat daya tangkap mereka rendah.
18	Maed Zen dra	Ketua tim penyuluhan	Apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan penerapan perdakewenangan kampung ?	Kami sudah berupaya dan kami memiliki beberapa upaya yaitu sosialisasi secara umum, pendekatan personal dan konsolidasi dengan pemerintah kampung dan tingkat keberhasilan sudah mencapai 50%
19	Indah Suryani	Guru	Bagaimana tanggapan anda setelah mengikuti sosialisasi mengenai perdakewenangan kampung ?	Berbeda, materi yang disampaikan tim kecamatan lebih lengkap daripada tim kampung.
20	Jhon	Kepala kampung	Bagaimana konsolidasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah kabupaten ?	Susah dimengerti dan berbelit-belit

B) Tabel Wilayah Administrasi

			Jumlah		Jumlahpenduduk				KeteranganNama
No	NamaKam pung	Luas Wilayah	Dusun	RT	KK	LK	PR	Jumlah Jiwa	KepalaKampung
1	Air Ringkih	12630 Km ²	10	17	820	1531	1370	2901	Mutholib
2	Beringin Jaya	11000 Km ²	4	8	451	797	820	1617	NurmanHadi
3	Gunung Sari	10500 Km ²	6	11	642	1278	1006	2284	Wanasahir
4	LebakPeni angan	40000 Km ²	9	25	1276	1625	1750	3375	Triwanto
5	Madang Jaya	10000 Km ²	5	8	424	748	777	1525	Mirhanudin
6	SimpangT iga	30000 Km ²	7	12	739	2080	2132	4212	Hendra
7	Tanjung Jaya	15120 Km ²	6	13	404	801	753	1554	Bahrudin
8	TanjungTi ga	30000 Km ²	8	15	797	1398	1338	2736	Sukiman
9	KaryaMaj u	12520 Km ²	5	7	292	488	447	935	Thomas Alpa Edison
10	Mulya Jaya	13330 Km ²	7	14	557	938	876	1814	Jonhendri
	Jumlah	185100 Km ²	67	130	5827	11894	13083	24977	

C) Dokumentasi

